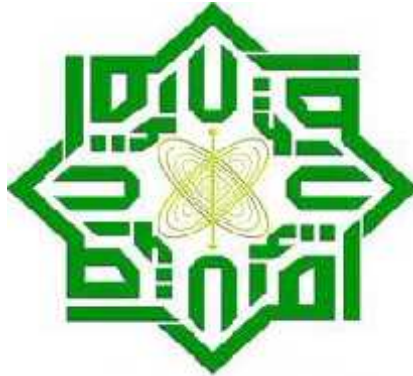


**FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN FARAIDH DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM (Kajian Di Kampung Bukit
Kangkar Johor, Malaysia)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



OLEH :

**MUHAMMAD YASIN BIN MUKHTAR
NIM : 10821004983**

**PROGRAM S1
JURUSAN *AHWÂL AL-SYAKHSHIYYAH***

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2013 M/1434 H**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian Di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia)”**

Penundaan pembagian harta warisan adalah masalah yang sangat penting karena dapat meninggalkan kesan negatif terhadap sebuah keluarga. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penundaan faraidh yang berlaku di Kampung Bukit Kangkar, Johor Malaysia dan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan ini.

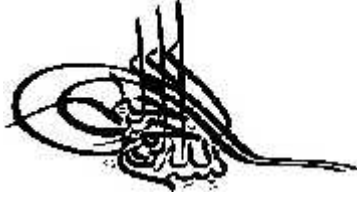
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mayoritas penduduk di Kampung Bukit Kangkar menundakan pembagian warisan, perkara ini akan menimbulkan banyak kesan negatif terhadap sesebuah keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kampung Bukit Kangkar, Johor Malaysia. Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus penundaan warisan di Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Bukit Kangkar pada tahun 2011 sebanyak 44 kasus. Sampel di dalam penelitian ini diambil sebanyak 22 kasus dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 50%. Data yang diperoleh melalui angket dan wawancara guna untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci dan jelas.

Faktor-faktor penundaan yang berlaku adalah karena kurang ilmu pengetahuan dan maklumat, salah tanggapan, pertikaian di kalangan ahli waris, tiada sesiapa dalam keluarga yang ingin menguruskan pembagian warisan, terlalu sopan, sikap tidak mengambil berat, dan tidak mau harta berpindah kepada orang lain.

Hasil dari penelitian ini mendapati antara semua penyebab penundaan faraidh tidak boleh dijadikan alasan untuk melambatkan pembagian warisan, kecuali ada persepakatan para ahli waris.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur adalah milik Allah swt, yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan manusia tersebut adalah kurnia fikiran dan kecerdasan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw dan keluarga serta sahabat Baginda. Karena baginda adalah sosok yang telah berjasa memberi bimbingan terhadap aktualisasi pikiran dan kecerdasan kepada manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Sesungguhnya di dalam menyelesaikan penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini menghadapi ujian dan rintangan akibat dari beratnya topik perbahasan yang diteliti, namun penulis akhirnya memperoleh inspirasi dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini. Penulis berhasil menyiapkan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN FARAI DH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (KAJIAN DI KAMPUNG BUKIT KANGKAR JOHOR, MALAYSIA)”**

Adapun, dikesempatan yang berharga ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat yang mendalam serta terima kasih kepada :

- 1- Ayahanda dan ibunda tercinta dan tersayang yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Serta keluarga penulis yang tersayang,
- 2- Bapak Dekan dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, MA yang merupakan Dosen Pembimbing penulis dalam menyiapkan penulisan skripsi ini.
- 3- Bapak Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN SUSKA.
- 4- Secara khusus ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada saudara-saudara yang telah memberi sokongan dan galakan, begitu juga Akmal, Muhaimin, Syukur, Hadi, Syahid, Hafizi Muid, teman Serumah Cenderawasih serta teman-teman se-indonesia dan Mahasiswa Malaysia terutama di Pekanbaru, teman-teman AH, teman-teman se fakultas Syariah, kasih sayang dan perhatian mereka telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, penulis hanya dapat mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memerlukan kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pelbagai pihak, terutama insan akademik.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan Terima Kasih Semua, semoga karya tulis ini memberi manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 3 Juni 2013

Penulis

Muhammad Yasin
NIM:10821004983

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Bukit Kangkar	16
B. Lokasi Kampung Bukit Kangkar.....	18
C. Bilangan Penduduk Kampung Bukit Kangkar	19
D. Tahap Pendidikan.....	21
E. Pekerjaan	22
F. Perkauman	23
G. Kegiatan Ekonomi	24
H. Info Prasarana	26

BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian, Penetapan Warisan, Dasar Hukum Dan Azaz-Azaz Kewarisan Islam	29
B. Sebab-Sebab Menerima, Sebab-Sebab Tidak Menerima, Kelompok Keutamaan Dan Hijab Kewarisan	43
C. Tindakan Pendahuluan Terhadap Pembahagian Harta Warisan	55
D. Lembaga Yang Menguruskan Harta Warisan Di Malaysia.	60

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN FARAI DH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Permasalahan penundaan faraidh yang berlaku di Kampung Bukit Kangkar	62
B. Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Di Kampung Bukit Kangkar	64
C. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

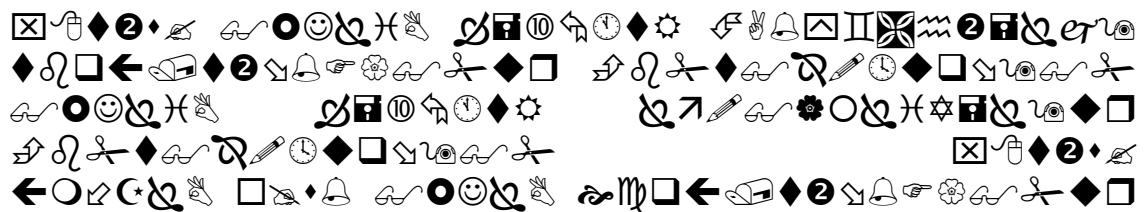
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam alquran.

Firman Allah swt. :

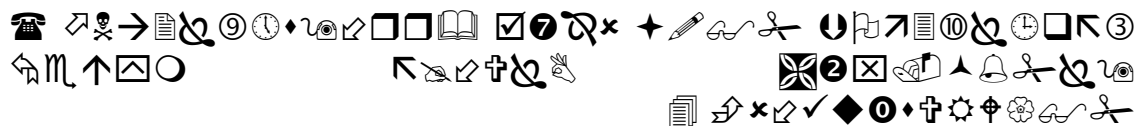




Artinya : “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.(QS. an-Nisaa’ : 7)

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.¹

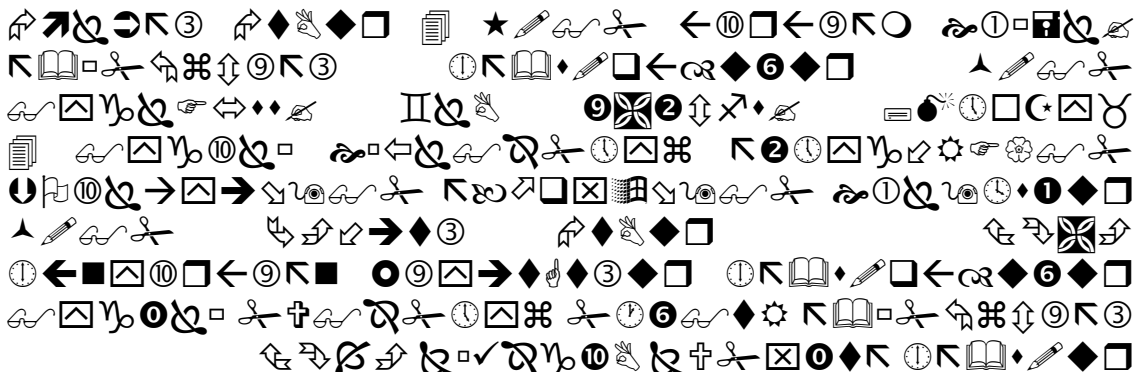
Firman Allah swt.:



Artinya : “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.” (QS an-Nisaa’ : 11)

Selain itu juga, Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya. Firman Allah swt. :

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 32



Artinya : “Segala hukum Yang tersebut adalah batas-batas (Syariat) Allah. dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam syurga Yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan Yang amat besar. Dan sesiapa Yang derhaka kepada Allah dan RasulNya, dan melampaui batas-batas SyariatNya, akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam api neraka, kekalah Dia di dalamnya, dan baginya azab seksa Yang amat menghina.” (QS an-Nisaa’ : 13-14)

Para ulama sepakat, dengan kematian seseorang maka ketika itu juga harta berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Karena adanya kematian, putuslah hubungan kepemilikan dengan hartanya.²

Salah satu prinsip kewarisan Islam adalah ijbari, yang mana pilihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau dari ahli waris.³

Harta yang diwariskan mayat akan menjadi milik semua ahli waris. Sesuai dengan bagiannya yang ditetapkan Allah SWT. Jumlah yang dibagikan dihitung setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, melunasi utang-utangnya dan melaksanakan

² Bachtiar Nasir , “Menahan Harta Warisan” artikel dari Konsultasi Agama, *Republika, Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432*

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 17

wasiat. Biaya penyelenggara jenazah tidak disebut didalam al-Quran, tetapi jumhur ulama menetapkan bahwa biaya tersebut adalah tindakan yang paling awal dilakukan.⁴

Seseorang tidak berhak dan tidak boleh menghalangi ahli waris dari mendapatkan haknya atas harta warisan itu. Tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain.⁵ Ahli waris sememangnya berhak mendapatkan hak warisan selagi mana masih hidup, walaupun hanya sekejap.⁶

Penundaan harta warisan berkemungkinan menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta atau haknya, kerna dikhawatirkan salah satu ahli waris meninggal dunia. Sedangkan dalam Islam amat menitikberatkan hak-hak seseorang baik individu masyarakat mahupun negara.

Islam melarang setiap yang membahayakan dan merugikan, ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad s.a.w yaitu :

بِ
نُهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

⁴ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm 46

⁵ Bachtiar Nasir , “Menahan Harta Warisan” artikel dari Konsultasi Agama, *Republika*, Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432

⁶ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris (Menurut Al-Quran Dan As Sunnah Yang Shahih)*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir : 2006) Hlm 27

Artinya : “Dari Abu sa’id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan orang lain.”⁷

Pengertian *ad-Dharar* dan *ad-Dhiraar* :

Para ulama berbeda pendapat : apakah terdapat perbedaan makna pada kata *ad-Dharar* dan *ad-Dhiraar* ? diantara mereka ada yang mengatakan : “arti kata kedua tersebut adalah sama, yaitu untuk menguatkan.” Sedangkan pendapat yang terkenal bahwa terdapat perbedaan makna dari kedua kata tersebut.⁸

ad-Dharar (bahaya) adalah lawan dari manfaat. Makna hadis tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat (bahaya) tanpa ada alasan yang benar yang tidak diakui oleh syariat.

Ada juga yang mengatakan bahwa *dharar* yaitu menimbulkan mudharat kepada orang lain yang tidak menimbulkan mudharat kepadanya, sedangkan *dhiraar* ialah menimbulkan mudarat kepada orang yang telah menimbulkan mudharat kepadanya dengan cara yang tidak diperbolehkan.⁹

Sesuai hadis diatas, tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan orang lain, yaitu jangan la memudharatkan orang lain. Akibat dari penundaan faraidh bisa menimbulkan kemudharatan kepada ahli waris yang lain.

⁷ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi* (Pustaka Imam Syafi'i : 2011) Cet Pertama, Hal 623

⁸ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi* (Pustaka Imam Syafi'i : 2011) Cet Pertama, Hal 623

⁹ Ibid hal 624

Pada dasarnya Islam mengutamakan agar penunaian hak itu harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, sebab menyangkut hak sesama manusia. Penundaan pelaksanaan hak sesama manusia sering mengakibatkan perampasan terhadap hak tersebut, termasuk hak ahli waris terhadap harta warisan.

Tegasnya mempercepat pelaksanaan pembahagian harta warisan lebih baik dari menunda-nunda sebab sepeninggalan si pewaris setelah haknya yang menyangkut pengelenggaraan jenazah, pelaksanaan hutang dan pelaksanaan wasiat diselesaikan semuanya telah menjadi hak ahli waris.

Selain itu, pembagian harta warisan itu harus disegera oleh kerna kemungkinan ahli waris sememangnya benar-benar membutuhkan uang dari harta warisan. Kecuali, ada masalah syar'i yang ingin dicapai sehingga mengharuskan penundaan pembagian harta warisan. Akan tetapi penundaan itu harus atas persetujuan semua ahli waris. Setelah diketahui semua ahli waris, juga bagiannya masing-masing, pertambahan dan penyusutan harta setelah itu dikembalikan kepada semua ahli waris agar tidak ada seorang pun yang dizalimi. Menunda pembagian harta waris akan menzalimi sebagian ahli waris yang sangat membutuhkannya. Padahal, perbuatan zalim adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih.¹⁰

Dalam praktiknya dapat ditemui satu masyarakat yang mayoritasnya memperlakukan penundaan pembahagian harta warisan. Apabila pewaris meninggal

¹⁰ Bachtiar Nasir, "Menahan Harta Warisan" artikel dari Konsultasi Agama, *Republika*, Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432

dunia, ahli waris akan menundakan pembahagian harta, baik dalam rangka waktu setahun atau lebih. Kasus ini terjadi di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia.

Bukit Kangkar adalah sebuah bandar kecil di Johor, Malaysia. Ia terletak di daerah Ledang. Bukit Kangkar terletak lebih kurang 25 km dari Muar dan 10 km daripada Tangkak. Bukit Kangkar adalah berpusat di sekeliling kampung-kampung dan kawasan perumahan moden. Kampong Bukit Kangkar terdapat 14 rangkaian kampung kecil dan taman, dengan jumlah penduduk seramai 15 000 orang. Masyarakat Kampung Bukit Kangkar agama majoritas adalah agama Islam.¹¹

Di Malaysia pengendalian harta warisan oleh Amanah Raya Berhad, Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil, dan Mahkamah Tinggi. Amanah Raya Berhad Mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta alih saja dan nilainya tidak melebihi RM 600,000 (Rp 2 Milyar).¹² Seperti uang simpanan di bank, BSN, ASB, Tabung Haji, kereta, motorsikal, saham, dividen dan sebagainya. Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil pula, Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih (tanah) saja atau harta tanah beserta dengan harta alih¹³ seperti duit simpanan di bank dan sebagainya dan nilainya tidak melebihi RM 600,000. Seperti si mati meninggalkan dua bidang tanah saja atau meninggalkan dua bidang tanah dan duit simpanan di Tabung Haji. Mahkamah Tinggi Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan sama ada harta tak alih (tanah) atau harta alih yang

¹¹ Kantor Balai Raya Kampong Bukit Kangkar.

¹² Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta No. 532)

¹³ Akta (Pembagian) Harta Warisan Kecil 1955 (Akta No. 98)

nilainya melebihi RM 600,000 atau harta berwasiat (bagi bukan Islam) walaupun nilainya kurang dari RM 600,000.¹⁴

Oleh itu, bagi masyarakat Kampung Bukit Kangkar yang nilai harta warisan dibawah RM 600,000 akan dikendalikan oleh Amanah Raya Berhad dan Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil.

Di dalam statistik laporan dari Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Bukit Kangkar, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 majoritasnya menunda kasus pembahagian warisan.¹⁵

Jadwal 1 : Jumlah kasus penundaan pembagian harta warisan bagi tahun 2011

Tahun	Jumlah Kasus	TM	M
2011	60	16	44

Sumber : Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Bukit Kangkar

Keterangan : TM – Tidak Menunda

M – Menunda

¹⁴ Akta Probate dan Pentadbiran 1959 (Akta No. 97)

¹⁵ Kantor Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Kangkar, Johor.

Beranjakan dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kampung Bukit Kangkar menundakan pembahagian harta warisan. Oleh karena itu penulis akan membahas permasalahan ini dan menjadikannya sebagai suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN FARAI DH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Kajian di Kampung Bukit Kangkar, Johor, Malaysia)”**

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi penelitian ini adalah berkenaan dengan faktor-faktor penundaan pembagian harta warisan berdasarkan kasus pada tahun 2011 sahaja yang berlaku di Kampong Bukit Kangkar, Johor Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah masalah pembagian harta warisan yang terjadi dalam masyarakat di Kampung Bukit Kangkar, Johor?
- 2) Apakah faktor-faktor penundaan pembagian harta warisan di Kampung Bukit Kangkar, Johor?
- 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pembagian harta warisan di Kampung Bukit Kangkar, Johor?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana masalah pembagian harta warisan yang terjadi dalam masyarakat di Kampung Bukit Kangkar, Johor.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penundaan pembagian harta warisan di Kampung Bukit Kangkar, Johor.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pembagian harta warisan di Kampung Bukit Kangkar, Johor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran penulis terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang masalah penundaan pembagian harta warisan yang terjadi dalam masyarakat di Kampung Bukit Kangkar, Johor.
- b. Untuk memaparkan kepada masyarakat mengenai masalah penundaan warisan yang ditinjau menurut hukum Islam.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah dalam jurusan Ahwal al-Syahsiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Untuk menerapkan metode penelitian ini, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di bandar Kampung Bukit Kangkar, Johor, Malaysia. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah karena terdapat permasalahan yang bertentangan dengan hukum Islam di lokasi penelitian.

2. Subjek dan Objek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang telah menundakan pembagian dan lembaga yang menguruskan pembagian warisan di Kampung Bukit Kangkar yaitu Unit Pembahagian Pusaka Kecil. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah faktor-faktor penundaan faraidh yang dilakukan oleh masyarakat yang menundakan pembagian warisan di Kampung Bukit Kangkar Johor.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama¹⁶. Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus penundaan warisan di Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Bukit Kangkar pada tahun 2011 sebanyak 44 kasus¹⁷. Sampel di dalam penelitian ini diambil sebanyak 22 kasus dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 50%. Penetapan sample dilakukan dengan teknik purposive sampling (sample purposip) yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh peliti.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari masyarakat Kampung Bukit Kangkar yang telah menundakan pembagian warisan dan pimpinan dan karyawan di Unit Pembahagian Pusaka Kecil kawasan Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia.

¹⁶ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), Cet. Pertama, h. 93.

¹⁷ Kantor Unit Pembahagian Pusaka Kecil Kawasan Bukit Kangkar.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh hasil daripada bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut yang berhubung dengan penundaan warisan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam menghimpun data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknis antara lain:

- a. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan tertulis dan diajukan kepada masyarakat.
- b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan supaya data yang diterima adalah secara tepat. Untuk mendapat data yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mewawancarai pihak yang berwenang mengendalikan pembahagian warisan.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen tertulis yang berhubung dengan penulisan.

Metode Analisis data

Adapun metode analisis data yaitu analisis data deskriptif kuantitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul melalui angket, selanjutnya diklasifikasi ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut yang berdasarkan

angka. Kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis akan menganalisis metode seperti berikut :

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan.
2. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa¹⁸.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

¹⁸ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), Cet. Pertama, h. 93

BAB I: Pada permulaan bab ini penulis menyetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Penulis membahaskan Gambaran umum latar belakang Kampung Bukit Kangkar yang berisi tentang sejarah, lokasi, dan kedudukan.

BAB III: Dalam bab membicarakan pengertian, penetapan warisan, dasar hukum dan azaz-azaz kewarisan Islam, sebab-sebab menerima, sebab-sebab tidak menerima, kelompok keutamaan dan hijab kewarisan tindakan pendahuluan terhadap pembahagian harta warisan Di samping itu, lembaga yang menguruskan harta warisan di malaysia.

BAB IV: Pada bab ini pembahasan tentang apakah permasalahan yang berlaku di Kampong Bukit Kangkar. Kemudian pembahasaan faktor-faktor penundaan faraidh di Kampung Bukit Kangkar. Dan pembahasaan yang terakhir adalah analisis permasalahan ditinjau menurut hukum Islam.

BAB V: Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasaan, serta beberapa saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KAMPUNG BUKIT KANGKAR

A. Sejarah Kampung Bukit Kangkar.

Menurut asal cerita orang dahulu dan orang tua-tua, kampung Bukit Kangkar telah diterokai oleh Tok Alang Taat bin Ibrahim yang berasal dari Umbai Melaka. Pada tahun 1897 lebih 200 tahun yang lalu, Kangkar berasal dari bahasa Tionghwa yang bermaksud susah, karena semasa pedagang china berulang alik ke pekan Tangkak terdapat rintangan pokok besar yang tumbang merintang bukit (yang sekarang terletak tangki air yang menyalurkan bekalan air ke penduduk sekitar) yang menyukarkan kereta lembu berulang alik hingga menjadi rungutan serta sebutan orang berkenaan. Setiap kali melangkah batang kayu itu, mereka menyebut kangkarlah kangkar (susahlah susah) kerana hendak melangkah batang kayu ini berterusan hingga beberapa tahun sehinggalah kayu itu reput dengan sendirinya.

Rangkaian Bukit Kangkar pada masa itu adalah Kampung Bukit Kangkar/Kampung Batu 8 ½ / Kampung Batu 9 ½ dan Kampung Parit Pelampong. Yang bersempadan dengan Kampung Kundang Telok Rimba tetapi sekarang Kampung Bukit Kangkar mempunyai 9 buah taman, 4 buah kampung dibawah kawal setia Majlis Daerah dan Ketua Kampung Bukit Kangkar.

Dari permulaan hingga kini, Kampung Bukit Kangkar dibawah kawal selia penghulu berikut :

1. Allahyarham Tok Penghulu Samsu
2. Allahyarham Tok Penghulu Abdullah Bin Samsu.
3. Allahyarham Tok Penghulu Endut Bin Abdullah.
4. Allahyarham Tok Penghulu Haji Ramli Bin Endut.
5. Allahyarham Tuan Haji Hamid Bin Hj Ramli.
6. Allahyarham Tok Kassim Bin Haji Hamid.
7. Allahyarham Tok Md Siran Bin Bani.
8. Allahyarham Tok Masruddin Bin Anuar.
9. Tok Penghulu Tuan Haji Abd Talib Bin Mohd Noh.
10. Tok Penghulu Jamaludin Bin Jamil
11. sekarang dari tahun 2009. Tok Penghulu TN HJ Latif bin Hj Ahmad

Manakala Senarai Ketua Kampung Adalah Seperti Berikut:

1. Allahyarham Atuk Alang Taat Bin Hj. Ibrahim.
2. Allahyarham Hj. Kanin Bin Som.
3. Allahyarham Hj. Jantan Bin Long.
4. Allahyarham Hj. Abd Hamid Bin Hj. Hamzah.
5. Tn. Haji Abd Aziz bin Jantan.
6. En. Esa Bin Rahman.

7. Sekarang, Mulai tahun 2007 En. Jamadi Bin Abd Aziz.

Penduduk dan hasil pertanian.

Semasa Kampung Bukit Kangkar diterokai , penduduk 7 rangkaian kampung lebih kurang 300 orang sahaja dengan hasil utama pencariia penduduk adalah pinang/ kelapa dan getah, dan sekarang jumlah penduduk Bukit Kangkar dengan 9 rangkaian taman dan 7 rangkaian kampung lebih kurang 15, 000 orang statistik pada tahun 2005 (polis dan Jabatan Perangkaan) yang kebanyakan penduduk 65% beragama Islam 35% lain-lain agama.

B. Lokasi Kampung Bukit Kangkar

Bukit Kangkar adalah sebuah bandar kecil di Johor, Malaysia. Ia terletak di daerah Ledang. Bukit Kangkar terletak lebih kurang 25 km dari Muar dan 10 km daripada Tangkak. Bukit Kangkar adalah berpusat di sekeliling kampung-kampung dan kawasan perumahan moden. Kampong Bukit Kangkar terdapat 14 rankaian kampung kecil dan taman, dengan jumlah penduduk seramai 15 000 orang. Masyarakat Kampong Bukit Kangkar agama mayoritas adalah agama islam.¹⁹

Nama-nama kampung yang berada dibawah Kampung Bukit Kangkar :

1. Kampong Bukit Kangkar
2. Batu 9
3. Kampong Batu 81/2

¹⁹ Kantor Balai Raya Kampong Bukit Kangkar.

4. Kampong Batu 91/2
5. Kampong Parit Pelampong
6. Kampung Batu 10
7. Kampung Gelugur
8. Taman Kangkar Baru
9. Taman Kangkar Jaya
10. Kangkar Jaya 2
11. Taman Sentosa
12. Taman Sentosa 2
13. Taman Cempaka Wangi
14. Taman Kenangan.

C. Bilangan Penduduk Kampung Bukit Kangkar

Tabel 1.0

Bilangan Penduduk Kampung Bukit Kangkar Berdasarkan Gender

JENIS KELAMIN	JUMLAH
LELAKI	7,000 ORANG
PEREMPUAN	8,000 ORANG
JUMLAH KESELURUHAN	15,000 ORANG

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Jumlah penduduk di Kampung Bukit Kangkar sebanyak 15,000 orang. Lelaki seramai 7,000 orang dan perempuan sebanyak 8,000 orang kesemuanya.

Tabel 1.1

Penduduk Kampung Bukit Kangkar Berdasarkan Umur

UMUR	LELAKI	PEREMPUAN
60 TAHUN KE ATAS	1000	1200
40 – 59 TAHUN	700	800
18 – 39 TAHUN	2,300	2,000
13 – 17 TAHUN	1000	1000
12 – 6 TAHUN	1200	1500
0 – 5 TAHUN	800	1500
JUMLAH	7,000	8,000

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk kampung bukit kangkar yang 60 tahun keatas seramai 2,200 orang termasuk lelaki dan perempuan, 40 tahun hingga 59 tahun seramai 1,500 orang, 18 tahun hingga 39 tahun seramai 4,300 orang, 13 tahun hingga 17 tahun seramai 2,000 orang, 6 tahun hingga 12 tahun seramai 2,700 orang dan terakhir bawah 5 tahun seramai 2,300 orang. Jadi penduduk Kampung Bukit Kangkar majoritasnya penduduk berumur 18 tahun hingga 39 tahun.

D. Tahap Pendidikan

Tabel 1.2

Tahap Pendidikan Di Kampung Bukit Kangkar

PENDIDIKAN	LELAKI	PEREMPUAN
TABIKA	0	0
TADIKA	500	450
SEKOLAH RENDAH(SD)	300	200
SEKOLAH MENENGAH(SMA)	500	700
KOLEJ/UNIVERSITAS	100	150
JUMLAH	1,400	1,500

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Data di atas menunjukkan tahap pendidikan di Kampung Bukit Kangkar, yaitu tabika tiada, tadika seramai 950 orang, sekolah dasar 500 orang, SMP dan SMA seramai 1,200 orang, kolej dan universitas seramai 250 orang. Di sini menunjukkan penduduk Kampung Bukit Kangkar bukanlah dari kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi.

E. Pekerjaan

Tabel 1.3

Pekerjaan Penduduk Kampung Bukit Kangkar

PEKERJAAN	LELAKI	PEREMPUAN
KERAJAAN	200	300
SWASTA	1,200	1,200
NGO (NON-KERAJAAN)	100	40
SENDIRI	150	200
PENGANGGUR	90	120
LAIN-LAIN (OKU-ORANG KURANG UPAYA)	07	03
JUMLAH	1,747	1,863

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Data di atas menunjukkan penduduk kampung bukit kangkar yang berkerja sebagai pegawai kerajaan seramai 500 orang, swasta seramai 2,400 orang, berkerja bukan badan kerajaan seramai 140 orang, berkerja sendiri seramai 350 orang, menganggur seramai 210 dan yang kurang upaya seramai 10 orang.

F. Perkauman

Tabel 1.4

Bilangan Penduduk Berdasarkan Perkauman

KAUM	LELAKI	PEREMPUAN
MELAYU	4,600	5,000
CINA	2,000	2,600
INDIA	300	250
KADAZAN	-	-
IBAN	-	-
LAIN-LAIN	100	150
JUMLAH	7,000	8,000

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Kaum Melayu di kampung bukit kangkar seramai 9,600 orang kesemuanya, kaum Cina seramai 4, 600 orang, India seramai 550 orang Kadazan dan Iban tiada, dan lain-lain seramai 250 orang. Ini menunjukkan majoritas penduduk di Kampung Bukit Kangkar adalah kaum Melayu.

G. Kegiatan Ekonomi

Tabel 1.5

Kegiatan Pertanian Di Kampung Bukit Kangkar

NO	TANAMAN	HEKTAR	HASIL
1	KELAPA SAWIT	20	RM 20,000
2	PISANG	04	RM 4,000
3	GETAH	10	RM 10,000
4	KOKO	05	RM 9,000
5	DUSUN DURIAN	10	RM 12,000

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Kegiatan pertanian di Kampung Bukit Kangkar adalah kelapa sawit, yaitu tanah yang diusahakan seluas 20 hektar dan penghasilan perbulan sebanyak Rm 20,000. Tanaman pisang pula seluas 4 hektar dan hasil permusim sebanyak Rm 4,000. Pokok getah seluas 10 hektar dan hasil perbulan Rm 10,000. Koko seluas 5 hektar dan hasil permusim Rm 9,000. Dusun durian seluas 10 hektar dan hasil permusim sebanyak Rm 12,000.

Tabel 1.6**Kegiatan Penternakan Di Kampung Bukit Kangkar**

NO	TERNAKAN	KUANTITAS	HASIL
1	PEMBENIHAN IKAN KELI	40,000	RM 24,000
2	TELUR ITIK	200	RM 4,000
3	AYAM KAMPUNG	500	RM 12,000
4	RUSA	15	RM 9,000
5	LEMBU	20	RM 15,000

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Kegiatan penternakan di kampung bukit kangkar adalah pembenihan ikan keli (lele), kuantitas sebanyak 40,000 dan hasil Rm 24,000, kemudian telur itik sebanyak 200 biji, hasil sebanyak Rm 4,000, ayam kampung sebanyak 500 ekor dan hasil Rm 12,000, rusa dengan kuantitas 15 ekor hasil sebanyak Rm 9,000, lembu 20 ekor dan hasil Rm 15,000.

Tabel 1.7**Industri Kecil Di Kampung Bukit Kangkar**

NO	INDUSTRI KECIL	KUANTITI	HASIL
1	TAPAI	1000	RM 400
2	TEMPE	700	RM 1,500

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Tapai sebanyak 1,000 kuantitas dan hasil Rm 400, dan tempe 300 kuantitas penghasilan Rm 1,500.

H. Info Prasarana

Tabel 1.8

Kemudahan Awam Di Kampung Bukit Kangkar

NO	INFRASTRUKTUR	KILOMETER
1	JALAN KAMPUNG BERTAR	30
2	JALAN KAMPUNG TANAH	10
3	JALAN SIMEN/JALAN KAYU	-
4	JETI/JAMBATAN	5

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Di Kampung Bukit Kangkar terdapat jalan yang bertar sepanjang 10 kilometer, jalan tanah sepanjang 5 kilometer, jalan semen tiada dan jambatan sepanjang 5 kilometer.

Tabel 1.9**Kemudahan Premis Pertiagaan Di Kampung Bukit Kangkar**

NO	KEMUDAHAN PERNIAGAAN	UNIT
1	PASAR MINGGU	60
2	PASAR LAMBAK/MINGGU	40
3	BENGKEL	03
4	KEDAI	40
5	GERAI	18

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Kemudahan premis di Kampung Bukit Kangkar adalah pasar minggu sebanyak 60 unit, pasar lambak atau pasar minggu sebanyak 40 unit, bengkel 3 unit, kedai 40 unit dan gerai 18 unit.

Tabel 1.10**Kemudahan Premis Pendidikan Di Kampung Bukit Kangkar**

NO	PUSAT PENDIDIKAN	UNIT
1	TADIKA/ TASKA	02
2	SEKOLAH RENDAH (SD)	01
3	SEKOLAH MENENGAH (SMA)	-
4	SEKOLAH AGAMA	01
5	PUSAT KOMPUTER	01
6	PUSAT TUISYEN	01
7	KOLEJ SWASTA	-
8	KOLEJ KERAJAAN	-
9	UNIVERSITAS	-

Sumber data : **Kantor Balai Raya Kampung Bukit Kangkar Tahun 2013**

Kemudahan yang telah tersedia di Kampung Bukit Kangkar adalah tadika atau taska sebanyak 2 unit, sekolah dasar 1 unit, sekolah menengah tiada, sekolah agam 1 unit, pusat komputer dan pusat tuisyen. Kolej swasta, kolej kerajaan dan universitas tiada di Kampung Bukit Kangkar.

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian, Penetapan Warisan, Dasar Hukum Dan Azaz-Azaz

Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqh mawaris, yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahliwaris). Kata ini berasal dari *warasa'*, yang terdapat antara lain di dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, 19 dan 176, yang dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.²⁰

Kata yang semakna dengan *warasa'* adalah *al-fara'idh*. Kata *al-fara'idh* (atau diindonesiakan menjadi *faraidh*) adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.

Secara terminologis terdapat beberapa pandangan mengenai hukum kewarisan yaitu antaranya :

²⁰ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm

Hukum yang berhubungan dengan pembahagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.²¹

Menurut Hasby Ash Shidieqy dalam mendefinisikan faraidh sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.²²

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.²³

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

2. Penetapan Warisan (Faraidh)

Pada masa jahiliyah sebelum Islam, bangsa arab menetapkan bahwa warisan hanya diterima oleh kaum laki-laki, sementara kaum

²¹ H. Fathurrahman, Lc. Hukum Waris, (Jakarta , Senayan Abadi Publishing : 2004) Cet. Pertama, Hlm 11

²² Hasby Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), Cet. 1, Hal. 18

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Ada Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung : 1984) Cet. 1, Hal 3

wanita tidak berhak mendapatkannya, dan itu pun bagi kaum laki-laki yang sudah besar, sementara laki-laki yang masih kecil tidak berhak mendapatkannya. Saat itu ada ketentuan pewaris melalui sumpah. Namun kemudian Allah menghapuskan semua ketentuan itu dan menurunkan ayat dari surah an-Nisa ayat 11 :



Artinya : “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.

tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat Yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti Yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.

Sebab turun ayat ini :

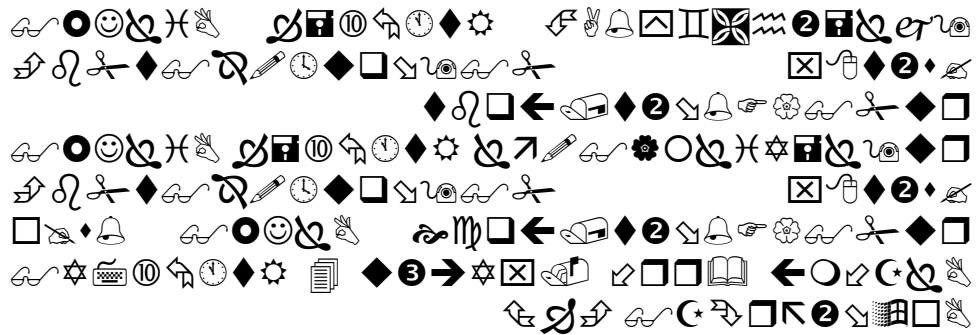
Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, “istri Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa dua anak perempuannya dari Sa’ad bin Rabi’, lantas berkata, “wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa’ad bin Rabi’. Bapak mereka berdua terbunuh sebagai syahid saat bersamamu di Uhud, dan paman mereka berdua mengambil harta milik mereka berdua tanpa menyisakan harta bagi keduanya, sementara keduanya tidak dapat menikah kecuali dengan harta.” Beliau bersabda, “*Allah memberikan keputusan terkait hal itu.*” Lalu turunlah ayat tentang warisan. Kemudian Rasulullah saw. mendatangi paman mereka berdua, dan bersabda, “Berilah dua anak perempuan Sa’ad dua pertiga, ibu mereka berdua seperdelapan, dan adapun sisanya maka itu untukmu.”²⁴ **HR Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.**

²⁴ Syyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala Publishing : 2009) Cet. 1, Jilid 5, Hlm 602

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

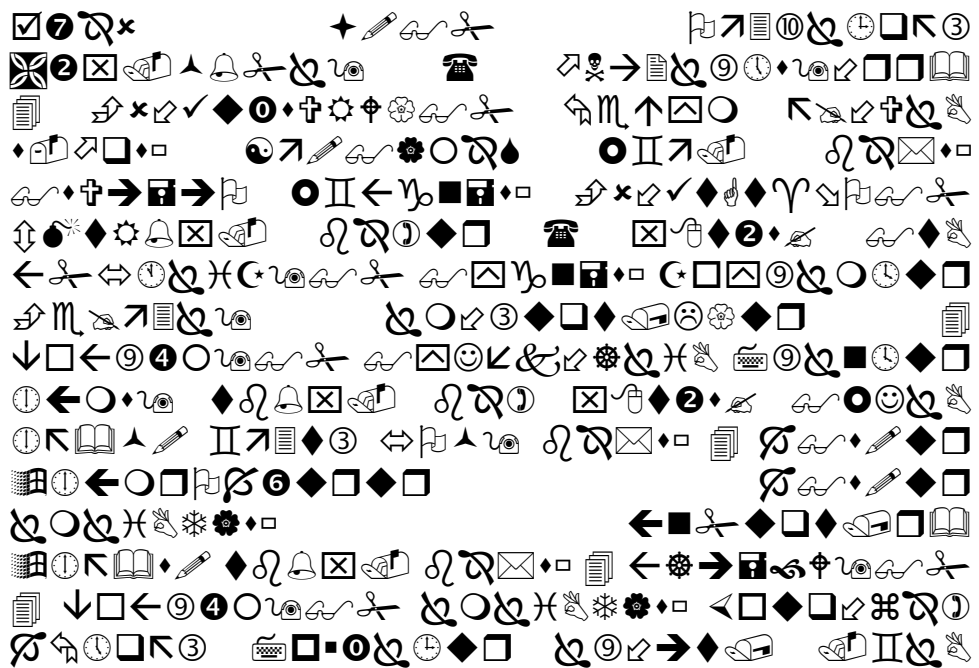
Hukum kewarisan Islam didasarkan pada al-Quran dan Hadist, hal itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran. Antaranya :

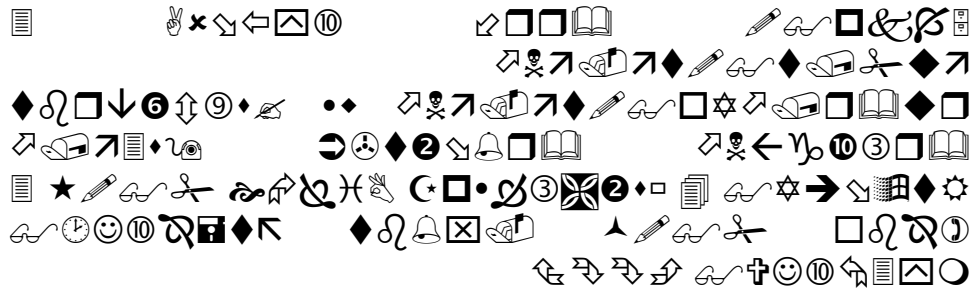
an-Nisa' ayat 7 :



Artinya : “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.

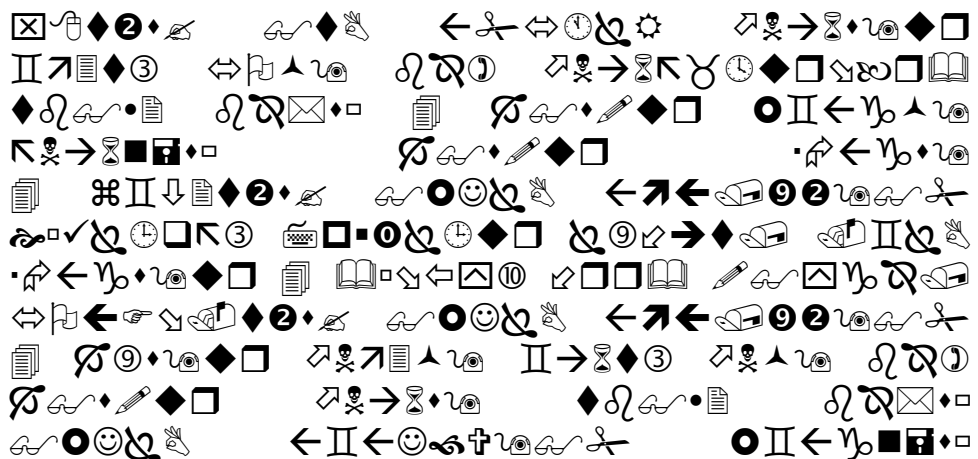
an-Nisa' ayat 11 :

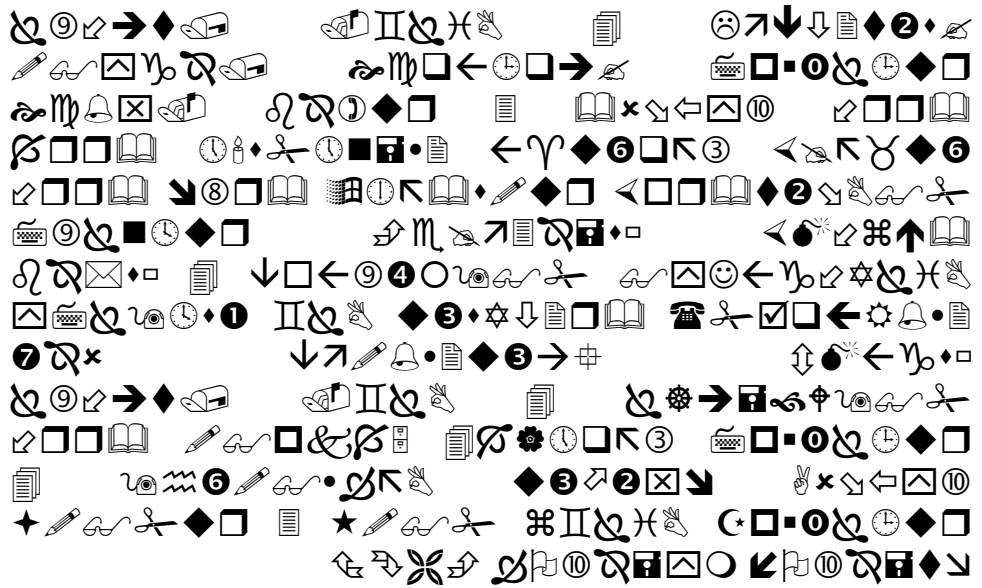




Artinya : “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat Yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti Yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.

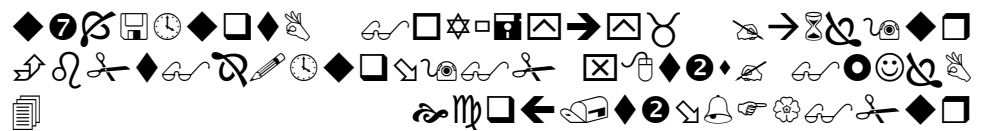
an-Nisa’ ayat 12 :

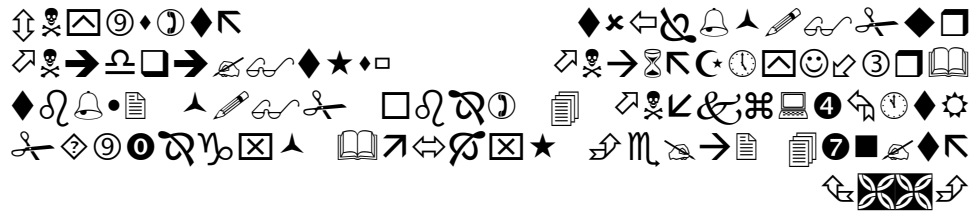




Artinya : “Dan bagi kamu satu perdua dari harta Yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta Yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta Yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta Yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati Yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, Yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara Yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki Dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat Yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat Yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyantun”

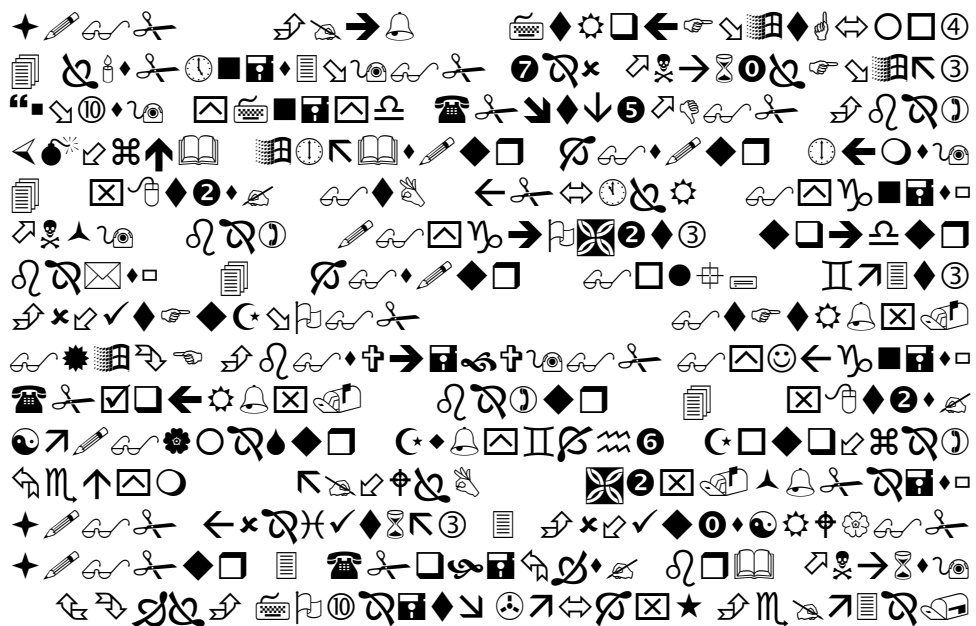
an-Nisa’ ayat 33 :





Artinya : “Dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan Yang telah mati), Kami telah tetapkan orang-orang Yang berhak mewarisi peninggalannya Iaitu ibu bapa dan kerabat Yang dekat. dan mana-mana orang Yang kamu telah membuat ikatan setia Dengan mereka (untuk bantu-membantu Dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.”

an-Nisa’ ayat 176 :



Artinya : “Mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad mengenai masalah Kalaalah). katakanlah: "Allah memberi fatwa kepada kamu di Dalam perkara Kalaalah itu, Iaitu jika seseorang mati Yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu satu perdua dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula (saudara lelaki itu) mewarisi (semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta Yang di tinggalkan oleh si mati. dan sekiranya mereka (saudara-

saudaranya itu) ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan". Allah menerangkan (Hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu."

Dasar-dasar kewarisan dalam Hadist, antaranya :

Hadis yang Ibnu 'Abbas ra. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut ²⁵:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الْحَفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) متفق عليه

Artinya : Daripada Ibnu 'Abbas berkata : Sabda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassallam “ Berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Adapun sisanya maka bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya.”

الله عليه و سلم لِابْنَةِ النِّصْفِ ، وَ لِابْنَةِ الْاَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ التَّلْتَيْنِ)
(

Artinya :”Daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan (seibu sebapa atau sebapa) “ Maka telah menghukumkan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassallam bagi anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 mencukupkan 2/3 dan bakinya bagi saudara perempuan” (Hadis riwayat Imam Bukhari)²⁶

²⁵ Muhammad Fuad Abd Bagy, *Lu'lu' Wa al-Marjan*, Terj, (Semarang, Al-Ridho, 1993) Jilid 1, Hal 380

²⁶ Muhammad Fuad Abd Bagy, *Lu'lu' Wa al-Marjan*, Terj, (Semarang, Al-Ridho, 1993) Jilid 1, Hal 380

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه

Artinya : “Daripada Usamah bin Zaid sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassallam bersabda :” Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”²⁷

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ) رواه أبو داود و النسائي

Artinya : Daripada Ibnu Buraidah daripada ayahnya : “Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila (si mati) tidak mempunyai ibu.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai’)²⁸

4. Asas-Asas Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraidh dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad saw. Dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan hartakepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima

²⁷ *Ibid* Hal 381

²⁸ *Ibid* Hal 381

dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.²⁹

a. Asas *ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

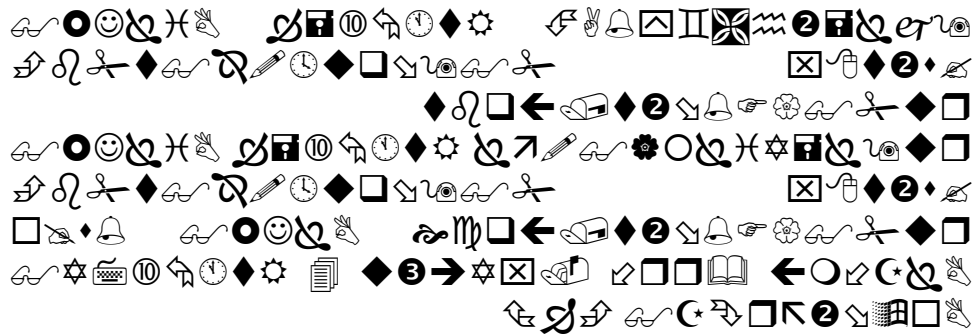
Kata *ijbari* secara leksikal mengandung erti paksaanya itu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Kata *ijbari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung erti paksaan, dengan arti, semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh kerana itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau tidak.³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 17

³⁰ *Ibid.* Hal 18

Aspek jumlah harta yang berpindah sudah jelas ditentukan dalam surah an-Nisa' :



Artinya : “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.

Pewaris atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangi.

Kata “*mafrudhan*” secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Dalam terminology fiqh, “*mafrudhan*” berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Maksudnya, bahwa jumlah harta itu sudah ditentukan dan harus dilakukan secara mengikat dan memaksa.³¹

Aspek siapa-siapa yang menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta waris sudah ditentukan secara pasti.

Manusia tidak memiliki otoritas sedikit pun. Surah an-Nisa :



³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 18

Artinya : “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu,”

Secara keseluruhan, hukum kewarisan Islam wajib dilaksanakan. Kata “*yushikum Allah*” berarti mensyariatkan atau memerintahkan. Hal yang lebih penting lagi, dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 13 dan 14 menyatakan bahwa barang siapa menaati undang-undang Allah, akan dimasukkan kesurga dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang yang mengingkari atau melanggar, masuk ke neraka dan kekal di dalamnya.³²

b. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.³³

c. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta

³² Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 19

warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagi kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.³⁴

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapaknya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insane sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam ushul fikih disebut “*ahliyat al-wujub*”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendirian harta warisan itu dan berhak pula tidak berbuat demikian.

d. Asas keadilan berimbang

Kata ‘adil’ merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*. Di dalam al-quran kata *al-adlu* atau turunannya disebut lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat

³⁴ *Ibid* Hlm 19

diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³⁵

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.³⁶

Sekiranya ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut di karenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita.

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 19

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 20

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisannya itu kewarisan akibat kematian semata.³⁷

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebut sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalau pun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.

B. Sebab-Sebab Menerima, Sebab-Sebab Tidak Menerima, Kelompok Keutamaan Dan Hijab Kewarisan

Dalam Islam untuk menentukan seseorang itu berhak menerima peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak harus semua orang berhak atas peninggalan mati.

1. Sebab-Sebab Menerima Kewarisan

³⁷ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007)
Hlm 47

Sebab dari seseorang berhak menerima harta si pewaris ada tiga sebab, yaitu sebab kekerabatan, sebab perkawinan dan sebab wala'.³⁸

a. Hubungan kekerabatan

Adanya hubungan kekeluargaan disebabkan oleh adanya hubungan darah dan hubungan darah ditentukan saat adanya kelahiran, maka setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang melahirkannya. Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang dapat menyebabkan seseorang ibu melahirkan, bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan kelahiran seorang perempuan maka diantara mereka telah terjalin hubungan kekerabatan, yang selanjutnya yang laki-laki itu disebut dengan ayah.³⁹

Hubungan kekerabatan tidak hanya terjadi adanya akad nikah yang sah antara suami istri, namun harus pula ada terjadi hubungan biologis antara keduanya, begitu pendapat jumhur ulama. Namun berbeda dengan pandangan Imam Hanafi yang mengatakan, hubungan kekerabatan sudah terjalin setelah terjadinya akad nikah yang sah. Berarti bila masih berstatus suami dan istri yang sah lalu lahir seorang anak, maka anak itu

³⁸ Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masyuk A.B.Dkk, (Jakarta, Basrie Press : 1996), Cet. 1, Hal 279

³⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, Hal 29-30

mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibunya, menurut Imam Hanafi.⁴⁰

Selain unsur kelahiran yang menjadi nasab juga nasab dapat terjadi melalui alat pembuktian.⁴¹ Apabila orang tua mengakui secara sah bahwa bayi itu adalah anaknya, maka dapatlah pengakuan tersebut diterima dengan syarat diketahui oleh ayahnya. Dan pengakuan tersebut tidak disanggah oleh anaknya dan untuk lebih kuatnya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan darah, apakah anak itu benar dari bapaknya.⁴²

Ahli waris yang berhak mendapat warisan dari sebab nasab adalah, dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, sebanyak 12 jenis ahli waris yaitu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.

Komponen ahli waris yang diungkapkan dalam al-Quran yang tersebut diatas dikenal dalam hukum kewarisan dengan tiga macam keturunan nasab yaitu :

- 1) Keluarga garis lurus kebawah, yaitu anak atau cucu
- 2) Keluarga garis lurus keatas, yaitu ayah dan ibu

⁴⁰ *Ibid*, Hal.30

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Cairo : Isa Al-Bab Al-Halaby, T,Th), Jilid 2, Hal.

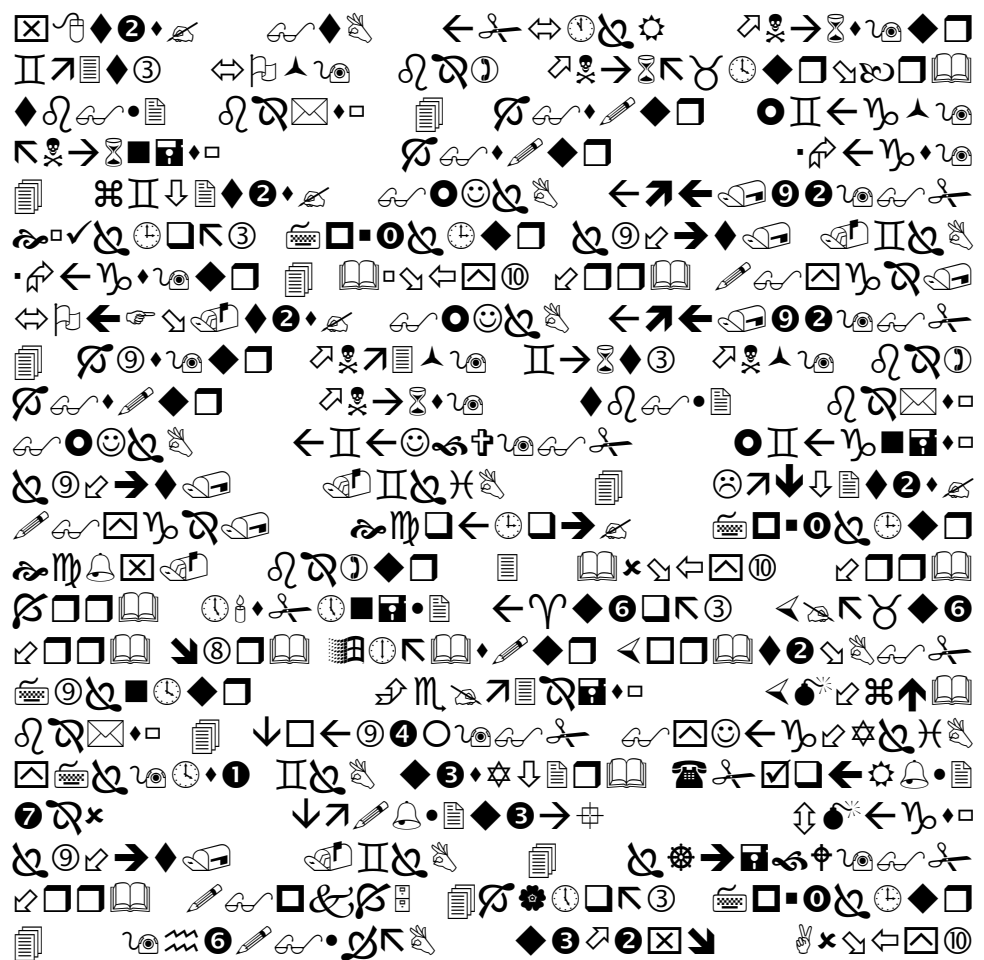
471

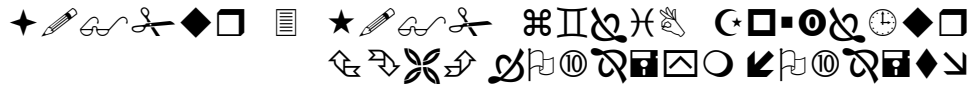
⁴² Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Cet 1, Hal. 66

3) Keluarga garis lurus kesamping yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang dekat, seperti saudara kandung, seayah dan seibu.

b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Dengan demikian suami dapat menjadi ahli waris dari istri dan sebaliknya. Dalam surat an-Nisa' ayat 12 di katakan :





Artinya : “Dan bagi kamu satu perdua dari harta Yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempuan dari harta Yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempuan dari harta Yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta Yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati Yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, Yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara Yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki Dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat Yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat Yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-warisi). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyantun”⁴³

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*azwaju*”, yang berarti secara etimologi berarti pasangan suami dan istri dalam segala hal. Ini berarti perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan akad nikah, yang dilakukan secara sah pula.

c. Hubungan Wala’

Secara etimologi wala’ berarti persahabatan atau nikmat kemerdekaan, untuk memperkuat kekerabatan maka seseorang harus merdeka dalam segala hal, termasuk dalam hal kewarisan. Karena itu,

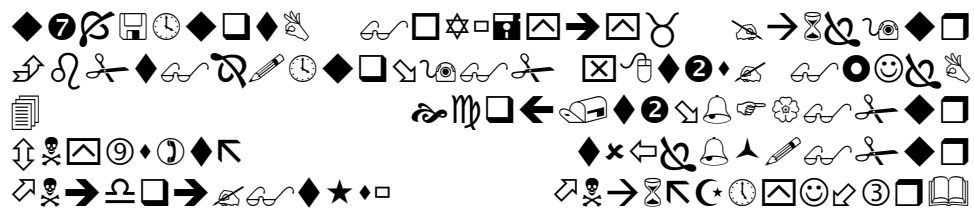
⁴³ Depag RI, *op.cit.*, Hal 117

secara terminologi wala' berarti suatu kekerabatan yang disebabkan oleh adanya pemerdakaan budak oleh tuannya.⁴⁴

Istilah lainnya wala' adalah nasab hukmi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “*perwalian lantaran pemerdakaan adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab.*” Yaitu perwalian yang dimaksudkan sebagai hubungan kekerabatan yang terjadi dengan sebab pemerdakaan budak yang disebut perwalian lantaran pemerdakaan atau kekerabatan yang terjadi disebabkan perwalian. Perwalian di sini maksudnya adalah akad antara dua orang yang yang salah satu dari keduanya bukan sebagai ahli waris nasab bagi pihak kedua, dan dia mengatakan kepada pihak kedua, kamu waliku atau kamu penggung perwalianku.⁴⁵

Adapun bagian orang memerdakaan hamba sahaya sepernam dari harta peninggalan. Maka bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya, dan begitu pula sebaliknya.

Dasar yang dijadikan pegangan untuk hal wala' ini adalah surat an-Nisa' ayat 33 :



⁴⁴ Muhammad al-Kodri, *Ushul Fiqh*, (Mesir : Mathaba' Al- Tijariah Kubra, 1956) Jilid II, Hal 155

⁴⁵ Ssyyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala Publishing : 2009) Cet. 1, Jilid 5, Hlm 606



Artinya : *“Dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan Yang telah mati), Kami telah tetapkan orang-orang Yang berhak mewarisi peninggalannya Iaitu ibu bapa dan kerabat Yang dekat. dan mana-mana orang Yang kamu telah membuat ikatan setia Dengan mereka (untuk bantu-membantu Dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu”.*⁴⁶

Dengan demikian dapat dipertegasakan bahwa hubungan wala’ menjad penyebab terjadinya kewarisan, karena al-Quran menganut prinsip persaudaraan, dimana persaudaraan dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal kewarisan seperti yang disinyalir dalam al-Quran.

2. Sebab-Sebab Tidak Menerima Kewarisan

Sebab-sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan(hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan adanya halangan kewarisan dan kelompok keutamaan dan hijab

a. Halangan Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, al-Quran membicarakan siapa-siapa ahli waris dan berapa hak yang didapatnya secara mutlak. Hadits Nabi memberikan penjelasan tentang siapa saja yang tidak boleh menerima warisan dalam uraian yang bersifat khusus. Penjelasan khusus dari nabi ini mentakhsis keumuman ayat al-Quran tentang ahli waris itu.

⁴⁶ Depag RI, *op.cit.*, Hal 122

Termasuk di dalamnya takhsis sunnah Nabi terhadap keumuman ayat kewarisan.⁴⁷ Diantaranya tentang penghalang kewarisan, yang menjadi penghalangan bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah:

1) Budak (Ar-riq)

Ar-riq menurut bahasa berarti pengabdian. Sedangkan menurut istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetapkan pada diri manusia. Penyebabnya pada asalnya adalah kafir. Kafir adalah penghalang warisan secara mutlak, baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyyah.

Oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi. Artinya, budak tidak bisa mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi. Sebab, status budak menghilangkan pemilikan. Karena status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan tidak memiliki harta.

Undang-undang syria tidak menyebutkan penyebab ini karena perbudakan sudah dihapuskan dari dunia.⁴⁸

2) Pembunuhan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), Cet 1, Hal 82

⁴⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. 1, Jilid 10 Hal 354

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad saw. :

لَيْسَ لِلَّذِي قَتَلَ وَالِدَهُ وَرِثَةً مِنْهُ

Artinya: “Dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya.”⁴⁹

Hadits Nabi ini memberikan penjelasan dalam bentuk membatasi atau mentakhsis keumuman ayat-ayat *mawaris* dengan arti ahli waris yang tersebut yang ditentukan bila ia bukan yang menyebabkan kematian dari pewaris. Alasan pembatasan yang ditetapkan Nabi ini sudah jelas maksudnya yaitu supaya seseorang tidak mempercepat proses kematian seseorang untuk segera mendapatkan harta warisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa.⁵⁰ Yaitu :

⁴⁹ Amir Hamzah Fachrudin, *Ringkasan Nailul Authar*, (Penterjemah), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) Jilid 4

⁵⁰ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. 1, Hal 54

- a) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di medan perang, melaksanakan hukuman mati, membela jiwa, harta dan kehormatan.
- b) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana) seperti, pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang terjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut :

- a) Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'I, bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menjadi penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- b) Menurut Imam Malik, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja.
- c) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- d) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishos, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishos tidak menghalangi kewarisan.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan⁵¹ :

- a) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- b) Untuk mencegah seseorang mempercepatkan terjadinya proses kewarisan.
- c) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu alan untuk mendapat nikmat.

3) Berbeda Agama

Perbedaan agama antara muwarrits dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama madzhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁵¹ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. 1, Hal 54

” Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”⁵²

Juga sabda Nabi Muhammad saw.,

” لَا يَرِثُ الْكُفْرَ وَلَا يَرِثُ الْكُفْرَ ”

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)”. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Tirmidzi)⁵³

Ini adalah pendapat yang unggul, sebab *walayah* (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang muslim dan orang kafir. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir, undang-undang Syria, tentang tidak ada waris mewaris antara orang muslim dan non muslim.⁵⁴

3. Kelompok Keutamaan Dan Hijab Kewarisan

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokkan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan. Kelompok keutamaan ini juga bisa disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan.

Namun penentuan kelompok keutamaan dalam hukum Islam lebih dominan ditentukan jarak hubungan ketimbang garis hubungan

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqholany, *Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh A. Hasan* (Bandung : CV. Dipenogoro, 1975), Cet. 1, Hal 282

⁵³ *Ibid* Hal 283

⁵⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. 1, Jilid 10 Hal 358

kekerabatan dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas, sebab keduanya mempunyai jarak yang sam dengan si mati⁵⁵. Hal ini didasarkan kepada ketentuan al-Quran dan surat an-Nisa' ayat 11.

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhijab) oleh waris yang lain.

Hijab dalam faraidh dibagi menjadi dua :

Pertama, *hijab awshaaf* (pelarangan karena sifat). Maksudnya adalah orang yang didapati pada dirinya salah satu sifat yang membuatnya tidak berhak untuk mendapat warisan. Sifat itu ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Kedua, *hijab asykhaash* (pelarangan karena seseorang). Maksudnya menghalangi seseorang dari hak warisannya secara mutlak atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya secara penuh. Sebab terjadinya kedua jenis hijab ini adalah terdapat seseorang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dihalangi tersebut.⁵⁶

C. Tindakan Pendahuluan Terhadap Pembahagian Harta Warisan

1. Tindakan pendahuluan terhadap pembahagian harta warisan

⁵⁵ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. 1, Hal 58

⁵⁶ *Ibid*

Di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari tersangkutnya atau bercampurnya hak orang lain di dalamnya atas dasar pengertian di atas, maka ada beberapa tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan terhadap harta peninggalan pewaris sebelum dibagi-bagikan terhadap yang yang berhak menerimanya.

Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut dibagi-bagikan adalah :

a) Biaya penyelenggaraan jenazah

Yang dimaksud biaya penyelenggaraan jenazah ialah biaya untuk memandikan, mengkafani, mengangkat jenazah dan membuat kuburnya serta menguburkannya. Biaya ini tidak boleh diambil berlebih-lebihan walaupun dari harta peninggalan jenazah sendiri.

b) Melunasi hutang piutangnya.

Sebelum harta dibagi-bagikan, maka hutang-hutang si mayit harus terlebih dahulu jika ia mempunyai hutang, dengan syarat yang mempunyai piutang itu menunjukkan bukti atau saksi yang jelas sebelum harta dibagikan.

Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dan At-Tirmidzi :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya : “Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi.”⁵⁷

Seandainya jumlah hutang lebih besar dari harta peninggalan itu, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta yang ada. Jika ada ahli waris yang ingin melunasi hutang si mayit tersebut baik secara perorangan maupun secara bersama, ini merupakan suatu kebajikan baginya, dan bukan suatu kebajikan hukum yang dapat dituntut oleh yang punya piutang.⁵⁸

c) Membayar zakat

Apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya, maka zakatnya harus dikeluarkan terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan zakat. Jika pada saat ia meninggal dunia harta itu sudah sampai hisabnya, namun belum sampai haul, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

d) Melaksanakan wasiat

Wasiat ialah pemberian hak kepada seseorang atau badan untuk memiliki, memanfaatkan sesuatu, yang pemberian hak itu ditangguhkan setelah pemilik hak itu meninggal dunia dan tanpa disertai imbalan atau penggantian berupa apapun dari pihak yang menerima pemberian itu

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqholany, *Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh A. Hasan* (Bandung : CV. Dipenogoro, 1975), Cet. 1, Hal 280

⁵⁸ Muhammad Anwar, *Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1981), Hal 21

karena wasiat merupakan keinginan terakhir dari yang meninggal dunia. Maka pelaksanaannya harus didahulukan dari pada hak ahli waris⁵⁹.

Para ahli waris wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal dunia maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkannya. Tanpa seizin siapapun. Sedangkan wasiat yang melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan setelah dikurangi hutang dan biaya lainnya, tidak dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi saw. :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ
سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ
الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ
الْثُلُثُ قَالَ فَالْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ
مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ
مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ
وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُ
يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya : “Hadis riwayat Sa‘ad bin Abu Waqqash ra., ia berkata: Nabi SAW datang menjengukku, ketika itu aku di Makkah dan beliau adalah orang yang benci bila meninggal di tempat dimana beliau berhijrah. Beliau berdo’a: semoga Allah merahmatimu Ibnu ‘Afra’. Aku berkata wahai Rasul Allah, apakah Aku wasiatkan seluruh hartaku. Beliau berkata: jangan. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, aku bertanya lagi: sepertiga. Beliau menjawab: dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia, dan sesungguhnya ketika engkau membarikan nafakah, sesungguhnya itu adalah

⁵⁹ *Ibid*, Hal 17

shadaqah walaupun sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan manfaat dari kamu, dan kaum yang lain (orang-orang kafir) menderita kerugian karenamu. Dan ketika itu ia tidak mempunyai seorang anakpun kecuali seorang perempuan.”⁶⁰

Dengan melaksanakannya hal-hal yang harus dilakukan sebelum pembahagian harta warisan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka harta warisan itu baru dapat dilaksanakan dan pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mana artinya :

“Dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi saw. dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadu perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberi keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi sae. berkata, kedua-dua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua

⁶⁰ Ash-Sha’any, *Subulus Salam*, (Bandung : Maktabah Dahlan, Tt), Juz 11, Hal 98

laki-laki itu, Nabi berkata : pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan (HR. Ahmad)”.⁶¹

Berdasarkan hadist ini, maka menunda pembahagian harta warisan tidak diperbolehkan sebagaimana rasul menyuruh orang yang telah menunda pembahagian harta warisan untuk segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dimana dengan peristiwa penundaan pembahagian harta warisan ini berakibat timbulnya permasalahan dikemudian hari.

D. Lembaga Yang Menguruskan Harta Warisan Di Malaysia.

Di Malaysia pengendalian harta warisan oleh Amanah Raya Berhad, Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil, dan Mahkamah Tinggi. Amanah Raya Berhad Mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta alih saja dan nilainya tidak melebihi RM 600,000.⁶²(Rp 2 Milyar) Seperti uang simpanan di bank, BSN, ASB, Tabung Haji, kereta, motorsikal, saham, dividen dan sebagainya. Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil pula, Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih (tanah) saja atau harta tanah beserta dengan harta alih⁶³ seperti duit simpanan di bank dan sebagainya dan nilainya tidak melebihi RM 600,000. Seperti si mati meninggalkan dua bidang tanah saja atau meninggalkan dua bidang tanah dan duit

⁶¹ Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung : Dahlan, Tt), Hal 121

⁶² Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta No. 532)

⁶³ Akta (Pembagian) Harta Warisan Kecil 1955 (Akta No. 98)

simpanan di Tabung Haji. Mahkamah Tinggi Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan sama ada harta tak alih (tanah) atau harta alih yang nilainya melebihi RM 600,000 atau harta berwasiat (bagi bukan Islam) walaupun nilainya kurang dari RM 600,000.⁶⁴

Oleh itu, bagi masyarakat Kampung Bukit Kangkar yang nilai harta warisan dibawah RM 600,000 akan dikendalikan oleh Amanah Raya Berhad dan Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil.

Pembagian harta warisan orang Islam di Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil adalah berlandaskan kepada hukum syarak, iaitu Hukum Faraid walaupun undang undang utama yang diguna pakai ialah undang-undang sivil. Ini kerana undang undang yang ada hanyalah untuk urusan pentadbiran semata-mata seperti tatacara momohon pembahagian, memproses permohonan, pembahagian bidangkuasa dan sebagainya. Pada peringkat penentuan waris, kadar bahagian masing-masing dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembahagian, semuanya tertakluk kepada hukum syarak. Contohnya peruntukan yang terdapat dalam Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98). Seksyen 12(7)⁶⁵ Akta 98 memperuntukkan bahawa pembahagian harta pusaka si mati hendaklah mengikut undang-undang terpakai kepadanya. Ini bermakna bagi orang Islam, pembagian hartanya hendaklah mengikut Hukum Faraid.

⁶⁴ Akta Probate dan Pentadbiran 1959 (Akta No. 97)

⁶⁵ Seksyen 12(7) : “Pemungut hendaklah menentukan, dalam apa cara yang paling sesuai, undang-undang yang terpakai kepada penurunan harta pusaka si mati, dan hendaklah memutuskan siapa mengikut undang-undang itu adalah untuk kepentingan masing-masing”.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN FARAIDH

A. Permasalahan penundaan faraidh yang berlaku di Kampung Bukit Kangkar

Unit Pembahagian Pusaka Kecil merupakan suatu lembaga swasta yang menguruskan pembahagian warisan bagi Kampung Bukit Kangkar. Sekiranya penduduk Kampung Bukit Kangkar ingin melaksanakan pembagian warisan bagi harta yang kurang dari RM 600.000 mereka akan menyelesaikan pembahagian di Unit Pembahagian Pusaka Kecil.

Menurut laporan statistik pendaftaran di Unit Pembahagian Pusaka Kecil pada tahun 2011 adalah⁶⁶ :

TABEL 4.0

Pendaftaran Kasus Di Unit Pembahagian Pusaka Kecil Pada Tahun 2011

Tahun	Jumlah Kasus	TM	M
2011	60	16	44

Sumber : **Unit Pembahagian Harta Pusaka Kecil**

Keterangan : TM – Tidak Menunda

M – Menunda

⁶⁶ Kantor Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Bukit Kangkar, Johor.

Data pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa hampir mayoritas penduduk Kampung Bukit Kangkar yang mendaftar di Unit Pembahagian Pusaka Kecil telah menundakan pembagian warisan, yaitu sebanyak 73% dari jumlah pendaftaran pada tahun 2011.

Sebanyak 44 kasus yang telah menundakan ini tidak semua sama tanggal kematian pewaris. Rinci seperti berikut:

TABEL 4.1

**TAHUN KEMATIAN PEWARIS BAGI PENDAFTAR KASUS
PEMBAGIAN WARISAN PADA TAHUN 2011**

TAHUN KEMATIAN	JUMLAH KEMATIAN
2010	2(5%)
2009	1(2%)
2008	3(7%)
2007	3(7%)
2006	8(18%)
2005	4(9%)
2004	8(18%)
2003	5(11%)
2002	4(9%)
2001	6(14%)
JUMLAH	44(100%)

Sumber Data : **Laporan Kantor Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil**

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2004 dan 2006 merupakan jumlah kematian yang terbanyak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan berdasarkan data di atas, pada tahun 2011 tempoh penundaan yang diambil

oleh ahli waris di Kampung Bukit Kangkar untuk melaksanakan pembagian warisan dari tahun kematian pewaris adalah selama 4 hingga 6 tahun.

B. Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Di Kampung Bukit Kangkar

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat Kampung Bukit Kangkar menunda pembagian harta warisan, antaranya adalah :

1) Kurang ilmu Pengetahuan dan Maklumat

Kurangnya ilmu mengenai faraidh merupakan salah satu faktor penyebab penundaan warisan di Kampung Bukit Kangkar. Pada table berikut ini di paparkan jawaban responden mengenai pengetahuan tentang faraidh.

TABEL 4.2

Tanggapan Responden Tentang Kewarisan Islam

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Mengetahui	2	(9%)
B	Mengetahui	3	(14%)
C	Kurang Mengetahui	12	(54%)
D	Tidak Mengetahui	5	(23%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Dari tabel yang dinyatakan di atas ini, dapat diketahui bahwa kebanyakan responden kurang mengetahui tentang apakah itu kewarisan

dalam islam, yaitu sangat mengetahui hanya 9%, yang mengetahui 14%, kurang mengetahui 54% dan tidak mengetahui sebanyak 23%. Dari keseluruhan jawaban responden, sebanyak 54% kurang mengetahui tentang kewarisan islam.

Selain itu juga, kebanyakan dari responden kurang mengetahui yaitu sebanyak 68% dan 23% tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kewarisan islam. Rician seperti berikut :

TABEL 4.3

Tanggapan Responden Mengenai Cara Pelaksanaan Kewarisan Islam

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Mengetahui	0	(0%)
B	Mengetahui	2	(9%)
C	Kurang Mengetahui	15	(68%)
D	Tidak Mengetahui	5	(23%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Penundaan pembagian juga dikarenakan ramai dikalangan responden tidak tahu apakah hukum menundakan pembagian faraidh. Ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.4**Tanggapan Responden Mengenai Adakah Kewarisan Islam Perlu Disegerakan**

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Wajib Disegerakan	3	(14%)
B	Tidak Wajib Disegerakan	4	(18%)
C	Makruh Disegerakan	7	(32%)
D	Tidak Mengetahui	8	(36%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Tabel di atas menunjukkan 36% yaitu jumlah yang tertinggi tidak mengetahui apakah hukum penundaan pembagian faraidh.

Selain itu, masih ada lagi masyarakat di Kampung Bukit Kangkar yang tidak mengetahui dengan kewujudan lembaga yang menguruskan pembagian faraidh. Rician di dalam tabel berikut :

TABEL 4.5**Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Lembaga Yang Menguruskan Warisan**

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Mengetahui	3	(13%)
B	Mengetahui	7	(32%)
C	Kurang Mengetahui	7	(32%)
D	Tidak Mengetahui	5	(23%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Data ini menunjukkan 32% daripada semua responden kurang mengetahui tentang lembaga yang menguruskan faraidh dan 23% tidak mengetahui.

Secara kesimpulannya dapat diambil, salah satu faktor utama penundaan faraidh berlaku dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan maklumat. Kebanyakan dari mereka semua tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang proses pembagian harta warisan sama ada dari segi hukum atau undang-undang. Mereka tidak tahu apakah yang harus mereka lakukan, ke mana dan kepada siapa harus di kemukakan perkara tersebut.

2) Salah Tanggapan

Sebagian masyarakat di Kampung Bukit Kangkar menganggap pembagian Faraidh yang disegerakan dianggap tidak sopan. Rincian seperti berikut :

TABLE 4.6**Tanggapan Responden Tentang Melambatkan Pembagian Warisan Dianggap Sopan**

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Setuju	8	(36%)
B	Setuju	11	(50%)
C	Sangat tidak Setuju	2	(9%)
D	Tidak Setuju	1	(5%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Data di atas menunjukkan 36% sangat setuju dan 50% setuju bahwa melambatkan pembagian faraidh dianggap sopan, dan hanya 9% sangat tidak setuju dan 5% tidak setuju melambatkan pembagian faraidh dianggap sopan.

Selain itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa adalah tidak wajar membagikan harta warisan terlalu awal, “tanah kubur masih merah”. Jika terdapat salah seorang waris yang menyarankan agar pembagian dan penyelesaian harta itu dibuat dengan segera, biasanya dia akan dipandang serong oleh ahli waris yang lain, dituduh sebagai tidak beradab, tidak menghormati si mati dan sebagainya. Oleh itu, untuk mengelakkan perkara ini, akhirnya semua waris mengambil sikap berdiam diri dan menanti-nanti bilakah perkara itu akan diselesaikan dan siapakah yang patut memulakannya. Anak sulung yang selalu menjadi tumpuan hanya berdiam diri. Penantian ini

kadang kala memakan masa yang lama sehingga bertahun-tahun.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Amin, dia mengatakan :

“Sekiranya pembagian harta warisan diberikan dengan segera dianggap tidak beradap dan tidak sopan, oleh karena masih terlalu awal. Seperti kata-kata orang melayu, ‘tanah kubur masih merah’”.⁶⁷

Masyarakat Kampung Bukit Kangkar menganggap bahwa pembagian warisan yang sesuai adalah tiga tahun keatas, rincian seperti berikut :

TABEL 4.7

Tanggapan Responden Mengenai Berapa Lamakah Tempoh Yang Perlu Diambil Untuk Melaksanakan Pembagian Kewarisan Islam

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Setahun Ke Bawah	4	(18%)
B	Setahun-Dua Tahun	3	(14%)
C	Dua Tahun-Tiga Tahun	5	(23%)
D	Tiga Tahun Ke Atas	10	(45%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Data di atas menunjukkan tiga tahun ke atas merupakan yang tertinggi yaitu 45%. 45% dari semua responden menganggap tiga tahun ke atas merupakan tempoh yang sesuai bagi untuk melaksanakan pembagian faraidh.

⁶⁷ Amin bin Sidik (Ahli Waris), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 9 Mei 2013

Selain itu juga, ramai orang menganggap sekiranya kita menundakan pembahagian warisan merupakan salah satu cara menghormati si mati. Sebagaimana dikatakan bapak Munir :

“Kami melambatkan pembagian warisan disebabkan kami ingin menghormati ayah kami, kalau kami menyegerakan pembagian warisan, seperti kami suka dengan pemergian ayah kami”⁶⁸

Rincian data tentang tanggapan masyarakat mengenai penundaan disebabkan karena menghormati orang yang meninggal :

TABEL 4.8

Tanggapan Responden Mengenai Adakah Penundaan Disebabkan Karena Menghormati Orang Yang Meninggal

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Setuju	8	(36%)
B	Setuju	11	(50%)
C	Sangat tidak Setuju	1	(5%)
D	Tidak Setuju	2	(9%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Data di atas menunjukkan ramai yang menganggap penundaan pembagian warisan merupakan cara untuk menghormati si mati, yaitu sebanyak 36% sangat setuju, 50% setuju mengenai perkara ini. Hanya 5% sangat tidak setuju, 9% tidak setuju.

⁶⁸ Abd Munir bin supian (ahli waris), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 9 Mei 2013

Kesimpulan yang dapat diambil, kebanyakan masyarakat Kampung Bukit Kangkar yang menundakan pembagian faraidh menganggap tidak sopan sekiranya pembagian faraidh disegerakan dan anggaran tempoh yang dianggap sesuai dan sopan untuk pembagian adalah tiga tahun ke atas dari tempoh kematian pewaris. Selain itu, mereka menganggap penundaan pembagian faraidh merupakan salah satu cara mereka menghormati pewaris.

3) Pertikaian di Kalangan Ahli Waris

Pertikaian sesama waris juga merupakan salah satu sebab mengapa harta warisan dibiarkan dan tidak diselesaikan dengan segera. Pertikaian mungkin wujud sebelum terjadi Kematian dan berlarutan. Apabila terjadi Kematian, waris-waris yang pertikaian itu tidak dapat bersua muka di antara satu sama lain apa lagi bertanya khabar tentang harta warisan atau berbincang mengenainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Kamsiah :

“Ada diantara kami yang bermasam muka dan tidak bertegur sapa sebelum ayah kami meninggal, jadi selepas kematian ayah kami mereka masih lagi belum bertegur sapa. Apabila ada diantara kami yang bermasam muka, bagaimana kami ingin membincangkan tentang pembagian pusaka ini”.⁶⁹

Selain itu, pertikaian mungkin juga wujud selepas Kematian. Mungkin ada di antara waris-waris yang tidak puas hati di dalam sesuatu perkara semasa pengurusan jenazah misalnya atau ada yang sengaja untuk coba

⁶⁹ Kamsiah binti Adnan (Ahli Waris), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 9 Mei 2013

menguasai atau membolot harta-harta si mati untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini terjadi akibat dari rasa tamak, dan kadang kala sayangkan harta itu supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Akibatnya harta warisan tidak dibagi dan dibiarkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad, dia mengatakan :

“Disebabkan harta, ramai yang bergaduh. Ada yang mahukan tanah, ada yang mahukan mobil dan lain-lain. Kami bukan dari kalangan orang berpendidikan agama, kami kurang mengetahui tentang warisan islam. Untuk mengelakkan dari kami bergaduh, kami menangguh pembagian ini sampai kami tahu mengenai Unit Pembahagian Pusaka Kecil”.⁷⁰

Secara kesimpulan, pertikaian di kalangan ahli waris merupakan salah satu faktor penundaan pembagian di Kampung Bukit Kangkar, baik pertikaian sebelum kematian pewaris mahupun setelah kematian pewaris.

4) Tiada Sesiapa Dalam Keluarga Yang Ingin Menguruskan Pembagian Warisan

Berdasarkan data yang diperolehi, ramai yang setuju bahwa penundaan warisan adalah dikarenakan tiada sesiapa yang ingin menguruskan. Data rincian seperti berikut :

⁷⁰ Ahmad bin Nasir (Ahli Waris), wawancara, Kampung Bukit Kangkar, 9 Mei 2013

TABEL 4.9**Tanggapan Responden Mengenai adakah penundaan pembagian warisan disebabkan tiada sesiapa di dalam keluarga yang ingin menguruskan**

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Setuju	3	(13%)
B	Setuju	9	(41%)
C	Sangat tidak Setuju	5	(23%)
D	Tidak Setuju	5	(23%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Sebanyak 13% sangat setuju dan 41% setuju bahwa penundaan pembagian dikarenakan tiada siapa yang ingin menguruskan. Sangat tidak setuju sebanyak 23% dan tidak setuju juga sebanyak 23% mengenai perkara ini.

Selain itu, ada juga yang hanya mengharapkan waris yang tertua (anak sulung) yang akan membuat tuntutan harta warisan. Waris lain hanya tunggu dan lihat. Oleh karena anak sulung tidak mengambil apa-apa tindakan, terjadilah keterlambatan dalam permohonan warisan. Sebagaiman yang dikatakan oleh bapak Idris, dia mengatakan :

“kami kalau boleh mahu mempercepatkan pembagian warisan, tetapi kami tidak mengetahui bagaimana hendak membagikannya. Jadi, kami cuma

mengharapkan abang long (anak sulung) kami untuk menguruskan, sebab dia yang lebih tua”⁷¹

Hal ini senada dengan ibu Karimah :

“Ramai dikalangan ahli waris malas hendak menguruskan harta warisan. Mereka hanya mengharap ada di antara ahli-ahli waris lain yang menguruskannya, yang selalu menjadi mangsa keadaan abang yang paling tua.”⁷²

Jadi dapat diambil kesimpulan, tiada sesiapa dalam keluarga yang ingin menguruskan pembagian warisan dan hanya mengharapkan waris yang tertua akan membuat pembagian, adalah merupakan salah satu faktor penundaan pembagian warisan.

5) Terlalu Sopan

Masyarakat Melayu terkenal dengan sifat sopan santun yang tinggi nilainya. Mereka amat berhati-hati agar tidak dikatakan orang sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dalam kasus penyelesaian harta warisan ini umpamanya, masing-masing takut untuk bersuara, bertanya tentang harta warisan nanti akan dituduh berkehendak harta atau tamakkan harta. Justru itu, masing-masing membiarkan harta warisan tersebut sehingga sekian lama tanpa menyelesaikannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Fatimah :

⁷¹ Idris bin Awang (Ahli Waris), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 9 Mei 2013

⁷² Karimah Binti Kamil (Pembantu Tadbir Unit Pembahagian Pusaka Kecil), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 10 Mei 2013

“kami tidak mahu nanti orang-orang kampung mengatakan yang kami sekeluarga hanya mahukan harta peninggalan ayah kami. Hari ini meninggal, esok terus membagi harta pusaka.”⁷³

Rincian mengenai tanggapan responden yang lain :

TABEL 4.10

Tanggapan Responden Mengenai adakah penundaan dikarenakan khawatir dianggap materialistik (suka kebendaan)

Opsi	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Setuju	13	(59%)
B	Setuju	5	(23%)
C	Sangat tidak Setuju	3	(13%)
D	Tidak Setuju	1	(5%)
	Jumlah	22	(100%)

Sumber Data : **Data olahan Angket Penelitian 2013**

Data di atas menunjukkan sebanyak 59% sangat setuju dan 23% setuju mengenai penundaan dikarenakan khawatir dianggap materialistik. Dan sangat tidak setuju 13%, tidak setuju sebanyak 5%.

Kesimpulan, karena terlalu sopan dan ingin menjaga agar tidak dikatakan orang sesuatu yang tidak baik, menjadi salah satu faktor penyebab penundaan pembagian warisan.

⁷³ Fatimah binti Samad (Ahli Waris), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 9 Mei 2013

6) Sikap tidak Mengambil Berat

Sebagian dari masyarakat pula menganggap bahwa tugas menyelesaikan harta warisan ini merupakan satu tugas yang ringan atau mudah. Mereka mengambil sikap enteng dan menganggap bahwa menangguk penyelesaian harta warisan ini tidak mendatangkan sebarang kasus sama ada dari segi hukum atau undang-undang.

Mereka tidak peduli terhadap tuntutan agama yang menuntut mereka agar menyegerakan pembagian warisan. Sebab itulah kadang kala harta warisan itu dibiarkan sehingga begitu lama tidak diselesaikan. Mereka hanya mau menyelesaikannya apabila sesuatu yang menguntungkan bakal menemui mereka, misalnya apabila harta tersebut hendak dijual, digadai atau diambil balik oleh kerajaan dan mendapat uang pampasan.

Selalu keadaan demikian terjadi ke atas hartanah. Mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya, karena tanah tidak ke mana. Selagi tidak terdesak selagi itulah tanah tersebut dibiarkan. Ada di antara mereka yang tinggal di luar daerah atau negeri enggan untuk pulang menyelesaikan warisan dengan alasan tidak ada masa, tidak memadai karena harta sedikit dan berbagai alasan lagi. Sedangkan apabila dibuat kenduri kawin misalnya mereka boleh pulang meraikannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rosli :

“Selama saya bekerja di Unit Pembahagian Pusaka Kecil, apa yang saya lihat mereka kurang memberi perhatian mengenai pembagian warisan karena

kebanyakan dari mereka ini duduk di bandar, masing-masing sibuk dengan urusan pekerjaan sehinggalah tanah pusaka ada orang yang ingin membelinya, kebiasaannya permasalahan ini mengenai tanah warisan”⁷⁴.

Hal ini senada dengan ibu Azlina, dia mengatakan :

“kebanyakan mereka mengambil perkara ini semudahnya, karena masing-masing mempunyai gaji yang besar, dan tidak mengharapkan harta warisan. Apabila sudah ada gaji, mereka malas untuk menguruskan pembagian warisan. Mereka menginginkan uang tetapi mereka malas hendak menguruskan”⁷⁵.

Berdasarkan data di atas, dapat dirumuskan disini bahwa faktor penundaan pembagian adalah disebabkan ahli waris mengambil sikap tidak mengambil berat, sehinggalah sesuatu itu memberi keuntungan kepadanya.

7) Tidak Mau Harta Berpindah kepada Orang Lain

Menurut bapak Herzan, dia mengatakan :

“Saya mendapati penundaan ini dikarenakan sikap pemohon itu sendiri yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, sebagian ahli-ahli waris ini di mana ada di kalangan mereka yang tidak mau menyusahkan diri, berasa senang dengan keadaan semasa. Mereka ini adalah di kalangan orang yang menduduki tanah warisan atas nama si mati”⁷⁶

Selain itu, pandangan bapak Abdul Rahman senada dengan hal ini :

“Ramai penduduk di Kampung Kangkar yang duduk bersama orang tua atau ibu bapanya. Apabila berlakunya kematian, ahli waris yang duduk bersama orang tuanya merasa tidak senang kalau buat permohonan untuk pembagian warisan. Karena dikhawatirkan dia harus berpindah dari rumah itu dan akan

⁷⁴ Rosli bin Nordin (Penolong pengarah Unit Pembahagian Pusaka Kecil), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 10 Mei 2013.

⁷⁵ Azlina Binti Abd Majid (Pembantu Tadbir Unit Pembahagian Pusaka Kecil), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 10 Mei 2013

⁷⁶ Herzan Bin Yasir (Ketuan Pembantu Tadbir Unit Pembahagian Pusaka Kecil), *wawancara*, Kampung Bukit Kangkar, 10 Mei 2013

dituntut oleh ahli waris lain.”⁷⁷

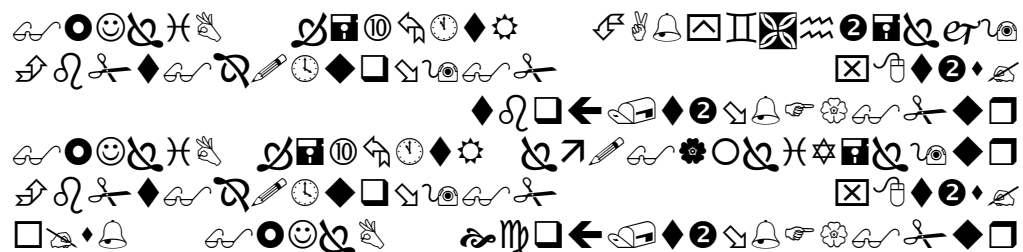
Dapat diambil kesimpulan, berdasarkan data di atas salah satu faktor penundaan faraidh dikarenakan ada sebagian ahli waris takut kehilangan tempat tinggal, karena sudah lama menetap bersama kedua ibu bapanya. Mereka menjadi berat hati dan takut untuk memohon warisan karena takut tanah yang diduduki mereka akan dituntut oleh waris-waris lain. Oleh yang demikian untuk mengelakkan wujudnya hubungan tidak mesra di antara ahli waris, maka lebih elok tanah tersebut kekal dengan nama si mati.

C. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Faraidh

1) Kurang ilmu Pengetahuan dan Maklumat

Di dalam masyarakat Kampung Bukit Kangkar segelintir masyarakat yang menundakan pembagian warisan adalah disebabkan kurangnya ilmu mengenai kewarisan Islam itu sendiri.

Di dalam al-Quran, surat an-Nisa ayat 7 :



⁷⁷ Abdul Rahman Bin Yunus (Setiausaha Unit Pembahagian Pusaka Kecil), wawancara, Kampung Kangkar, 10 Mei 2013



Artinya : “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.

Ayat di atas menjelaskan laki-laki dan perempuan-perempuan ada bagiannya, sedikit ataupun banyak. Itulah yang telah ditetapkan oleh Allah.

Akibat dari kejahilan ilmu kewarisan itu sendiri, berlakulah penundaan pembagian yang menimbulkan perkara negatif seperti terabainya hak seseorang ahli waris, lambat membayar hutang dan wasiat dan berlaku kematian berlapis.

2) Salah Tanggapan

Masyarakat Kampung Bukit Kangkar juga, ada sebagian yang menganggap penundaan pembagian adalah sopan, karena menganggap masih terlalu awal untuk dibagikan harta warisan.

Ini sangatlah bertentangan dengan hukum kewarisan islam, karena di dalam kewarisan islam terdapat asas kewarisan akibat kematian yaitu peralihan harta seseorang kepada orang lain harta kewarisan berlaku sesudah

matinya pemilik harta⁷⁸, artinya apabila seseorang meninggal maka berlakulah peralihan harta kepada ahli warisnya.

Jadi sekiranya penundaan ini disebabkan menganggap sopan, sangatlah tidak bersesuaian karena asas kewarisan islam itu sendiri adalah akibat kematian

3) Pertikaian di Kalangan Ahli Waris

Terdapat juga penundaan di karenakan pertikaian di kalangan ahli waris. Pertikaian ini seharusnya tidak berlaku, karena penetapan pembagian harta telah ditentukan dan bersesuaian dengan penerima itu sendiri. Seperti bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.

Mengenai pertikaian sangatlah dilarang dalam islam, sesuai hadis Nabi saw. :

Dari Abu Ayyub ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : “Seorang muslim tidak dihalalkan untuk meninggalkan (mendamkan) saudaranya lebih dari tiga hari di mana bila keduanya itu bertemu maka masing-masing dari keduanya itu saling membuang muka. Adapun yang paling baik di antara keduanya itu adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam”.⁷⁹

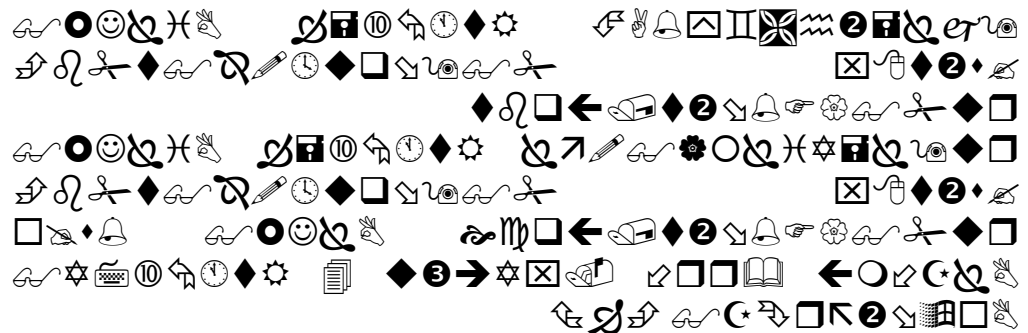
⁷⁸ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm 10

⁷⁹ Drs. Muslich Shabir, MA, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (PT. Karya Toha Putra Semarang) Cet. 1, Hal 265

Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan tidak diharamkan mendiamkan diri lebih dari tiga hari, sedangkan berdasarkan data-data yang diperolehi rata-rata menundakan pembagian selama 4 tahun tempoh selepas kematian pewaris. Pertikaian mengenai harta warisan sangatlah tidak sejajar dengan apa yang diajarkan oleh islam.

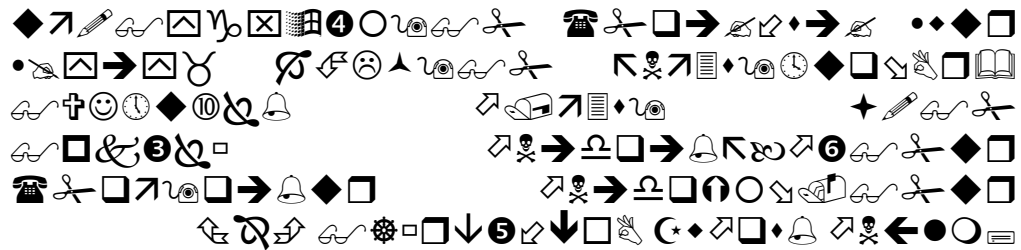
4) Tiada Sesiapa Dalam Keluarga Yang Ingin Menguruskan Pembagian Warisan

Tiada sesiapa dalam keluarga yang ingin menguruskan pembagian warisan juga merupakan faktor penundaan faraidh di Kampung Bukit Kangkar. Di dalam surat an-Nisa ayat 7, Allah ta'ala berfirman :



Artinya : “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.

Ayat di atas jelas menunjukkan semua ahli waris ada bagian masing-masing, baik sedikit mahupun banyak, pembagian sudah ditetapkan. Ini bahwasanya semua ahli waris mempunyai haknya di dalam harta pusaka. Jadi semua bertanggungjawab menguruskan pembagian warisan, oleh karena menyangkut hak masing-masing dan sekiranya ada ahli waris yang belum dewasa, harta bagianya berada dibawah penguasaan walinya, sedangkan nafkahnya dapat diambil dari hartanya itu.⁸⁰ Seperti firman Allah swt. Dalam surat an-Nisa ayat 5 :



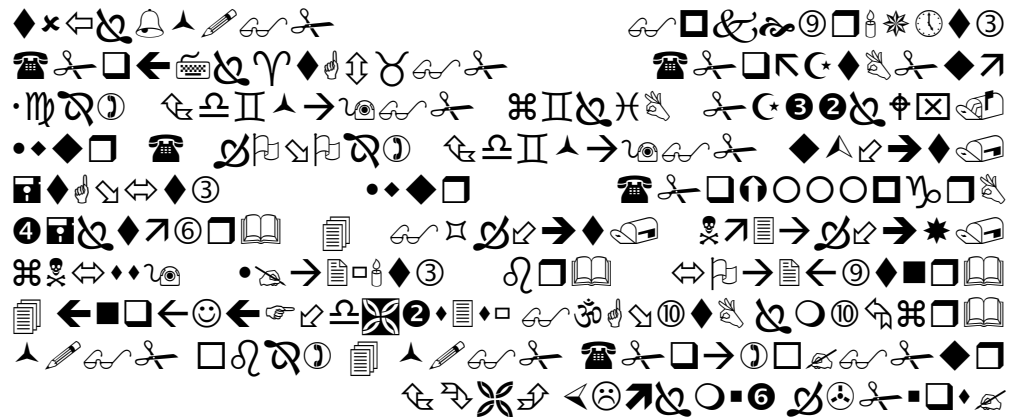
Artinya : “Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu, (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka Dengan kata-kata Yang baik”.

5) Terlalu Sopan

Dalam masyarakat Kampung Bukit Kangkar sekiranya pembagian disegerakan akan dianggap gila kebendaan.

⁸⁰ Hajar M, *HukumKewarisan Islam (FiqhMawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm 17

Ini sangatlah bertentangan dengan hukum islam, di dalam islam melarang mengata atau mengunjing orang lain. Seperti di dalam surat al-Hujurat ayat 12 :

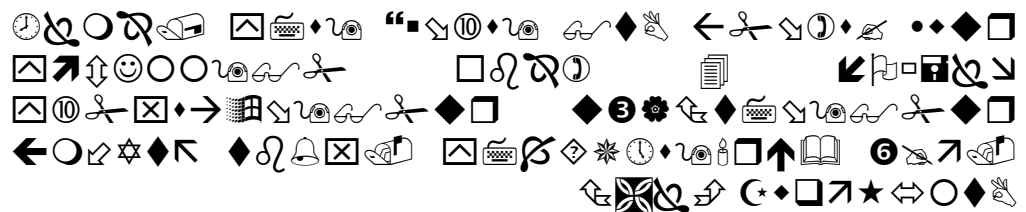


Artinya : “Wahai orang-orang Yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan Yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya Yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya Yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan Yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani”.

Di dalam ayat di atas melarang seseorang itu mengata atau mengumpat kepada orang lain, seperti mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh disebabkan sudah menjadi kebiasaan segelintir masyarakat mengatakan sekiranya menyegerakan pembagian dianggap gilakan kebendaan, menyebabkan pemikiran berubah menjadi sopan sekiranya melambatkan penundaan. Sedang

penundaan banyak menimbulkan perkara-perkara negatif baik kepada pewaris mahupun ahli waris.

Selain itu Allah berfirman dalam surat al-Israa ayat 36 :

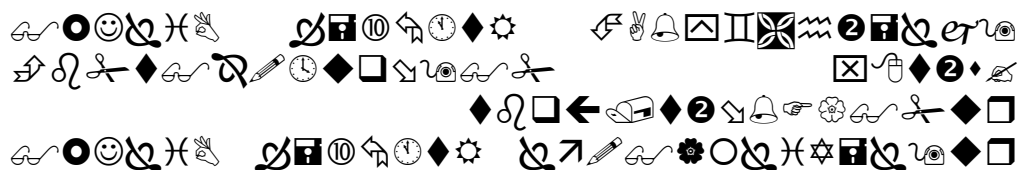


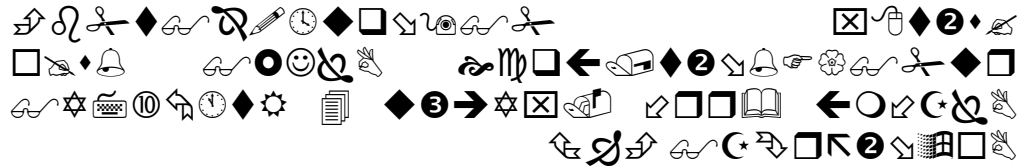
Artinya : “Dan janganlah Engkau mengikut apa Yang Engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa Yang dilakukannya”.

6) Sikap tidak Mengambil Berat

Sebagian masyarakat mengambil sikap tidak mengambil berat karena sudah mempunyai harta atau pendapatan sendiri.

Di dalam surat an-Nisa ayat 7, Allah ta’ala berfirman :





Artinya : “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.

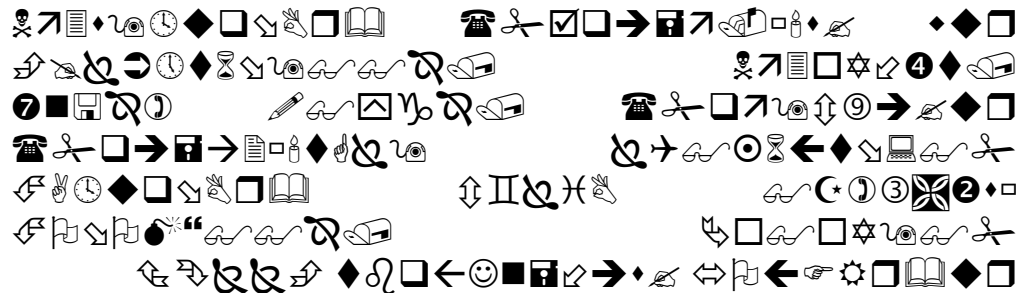
Semua mempunyai bagian masing-masing, mungkin ada sebagian sangat memerlukan harta warisan bagi menampung perbelanjaan hariannya atau kebutuhan harian. Sikap ini sangatlah bertentangan dengan islam, karena hanya mementingkan diri sendiri.

7) Tidak Mau Harta Berpindah kepada Orang Lain

Antara salah satu faktor penundaan adalah ada ahli waris yang tidak mahu harta berpindah kepada orang lain, seperti seseorang yang telah lama menetap bersama orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal. Karena khawatir selepas pembagian harta dia harus berpindah, dia hanya mendiamkan diri dan tidak mahu membagikan harta warisan.

Permasalahan begini, bisa mengakibatkan seseorang itu telah mengambil hak ahli waris yang lain. Berkemungkinan harta yang digunakan

itu, bisa saja itu seharusnya milik ahli waris yang lain, tetapi telah dipakai oleh orang lain. Di dalam al-Quran surat baqarah ayat 188 :



Artinya : “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu Dengan jalan Yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia Dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).”

Imam Al-Qurtubi menyimpulkan :

“Sesiapa yang memakan harta orang lain tidak di atas landasan izin syarak, maka dia telah makan secara bathil.”⁸¹

Syeikh Rashid Ridha meluaskan lagi bentuk dan arti ‘bathil’ kepada :

“Apa sahaja (bayaran) yang tidak mempunyai timbal balik yang wajar (yang punyai nilai pada pandangan syarak), lagi sebenar, maka ia tergolong dalam arti bathil.”⁸²

⁸¹ Zaharuddin Abd Rahman, “Kemaruk Harta Bathil”, artikel diakses pada 23 April 2013 dari www.zaharuddin.net. Html.

⁸² *Ibid* html.

Jadi, pembagian warisan harus disegerakan bagi mengelakkan dari terabainya hak seseorang dan termakan harta seseorang tanpa disedari, kecuali jika ahli waris sepakat (*takharuj*) untuk menundakan pembagian warisan karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan pada huraian sebelumnya (khawatir dianggap materialistik atau tidak sopan dipandang oleh masyarakat), seperti yang terdapat di dalam Akta di bawah seksyen 15 (1) :

“(1) Jika Pemungut berpuas hati bahawa semua benefisiari harta pusaka yang telah cukup umur dan berkeupayaan telah bersetuju antara mereka kepada cara di mana harta pusaka patut dibahagikan, Pemungut boleh, selepas merekodkan dalam perintah pembahagian terma-terma persetujuan; dan persetujuan pihak-pihaknya, membahagikan harta pusaka dalam cara yang diperuntukan oleh persetujuan melainkan ia adalah jelas kepada Pemungut adalah tidak adil dan tidak saksama untuk berbuat demikian.”

BAB V

PENUTUP

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat dirangkum beberapa kesimpulan dan di kemukakan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian dan analisis sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penundaan faraidh di Kampung Bukit Kangkar rata-rata tempoh penundaan adalah 4 tahun selepas kematian pewaris.
2. Penundaan faraidh di Kampung Bukit Kangkar adalah di sebabkan kurangnya ilmu pengetahuan, salah tanggapan, pertikaian dari ahli waris, tiada sesiapa yang ingin menguruskannya, terlalu sopan, sikap tidak mengambil berat, dan tidak mahu harta tidak berpindah milik kepada orang lain.
3. Faktor-faktor yang terjadi di Kampung Bukit Kangkar sangat tidak bersesuaian terhadap hukum islam, dan sangat bertolak belakang dari hukum islam.

4. Kesimpulan dari tinjauan hukum Islam, faktor-faktor penundaan di Kampung Bukit Kangkar tidak diperbolehkan dijadikan alasan untuk melambatkan pembagian warisan, kecuali para ahli waris mempunyai kesepakatan dalam pembagian setelah menyedari bagiannya.

B. Saran-Saran

Hasil dari pembahasan ini, adapun beberapa saran atau cadangan kiranya perlu disampaikan bagi meningkatkan proses pembagian harta warisan. Berikut adalah cadangan-cadangan yang di kemukakan :

1. Memperkenalkan sistem yang dinamakan Sistem Faraidh Berkomputer di bawah Sistem Maklumat Bersepadu yang mempunyai hubungan terus dengan ibu pejabat. Jika wujudnya peningkatan sistem pengurusan seperti ini segala maklumat boleh diperoleh di hujung jari pada bila-bila masa sahaja.
2. Mengadakan seminar "Sehari Bersama Waris" sekali sebulan di setiap kawasan dan ketua masyarakat bagi menerangkan kepada penduduk cara membuat permohonan harta warisan. Program seperti ini boleh menggalakkan orang ramai segera membuat permohonan warisan. Ini kerana mereka tidak paham tentang prosedur atau mereka beranggapan bahwa prosedur permohonan harta warisan menyukarkan, mahal dan lambat. Penyelesaian warisan yang segera dimohon dapat mengelakkan

kesulitan pada masa hadapan misalnya apabila kewujudan waris berlapis-lapis yang akan menyukarkan lagi pengiraan warisan. Permohonan warisan yang dibuat bagi Kematian proses pengiraan karena kemungkinan timbul masalah-masalah seperti ada waris yang sudah meninggal dunia, sukar di kesan, dokumen-dokumen hilang dari simpanan dan sebagainya.

3. Menyarankan Pegawai Tempatan atau Tokoh Masyarakat membuat permohonan bagi pihak waris sekiranya tiada permohonan dibuat selepas tempo enam bulan dari tarikh Kematian pemilik tanah. Langkah terbaru yang masih dalam perbincangan ialah untuk mengembangkan lagi unit warisan dengan menubuhkan beberapa unit baru memandangkan adanya keperluan untuk menambah pegawai-pegawai dan kaki tangan. Unit-unit tersebut dicadangkan antaranya di Melaka, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor.
-

DAFTAR PUSTAKA

A. Hassan, *Al-Faraidh* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1986)

Abdul Shakor Borham, *Amalan Pembahagian Harta Pusaka Orang-orang Islam di Daerah Muar, Johor*. Akademi Pengajian Islam, 1999, Universiti Malaya

Akta (Pembagian) Harta Warisan Kecil 1955 (Akta No. 98)

Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta No. 532)

Akta Probate dan Pentadbiran 1959 (Akta No. 97)

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1995) cet. 1

Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana. Cet Ke-3

Anonim, (2006). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi /Makalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum* , Riau : UIN Sultan Syarif Kasim.

Amir Hamzah Fachrudin, *Ringkasan Nailul Authar*, (Penterjemah), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) Jilid 4

Bachtiar Nasir , “Menahan Harta Warisan” artikel dari *Konsultasi Agama, Republika*, *Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432*

Dr Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, 2008, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, Cet Ke-3 Jilid 1

Dr Ahmad Rofiq, MA , *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) Ed. Revisi, Cet. 4

Dr. Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana 2010) Ed. 1, Cet. 1

Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *Syarah Riyadhus Shalihin* (Imam An-Nawawi),Terj. (Jakarta : Gema Insan, 2010) Cet. 1

Drs. Beni Ahmad Saebani, 2009, M.Si, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. Pertama.

Drs. Muslich Shabir, MA, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (PT. Karya Toha Putra Semarang) Cet. 1

Effendi Perangin, S.H , *Hukum Waris* (Jakarta : Rajawali Per, 2011) Ed 6

H.Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet Ke-2

Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, Pekanbaru : Alaf Riau. Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2001) Cet. 1

Kantor Balai Raya Kampong Bukit Kangkar.

Kantor Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil Kawasan Kampung Kangkar, Johor.

M. Quraish Sihab,2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, Jilid 1

Muda, Abd. Latif *Penghantar Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur : 1997) Cetakan 1

Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : Lentera, 2001) Cet. 1

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, 2006, *Panduan Praktis Hukum Waris (Menurut Al-Quran Dan As Sunnah Yang Shahih)*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo, Persada, 1997) Ed. 1, Cet. 1

Prof Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2008) Cet. 8

Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, 2009, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Amzah, Cet Pertama.

Prof. H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahantan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) Ed. Rev. Cet. 3

Prof. H. Muhammad Daus Ali, S.H., *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) Ed. 6

Prof.H.A. Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Prenada Media Group, Cet Ke-2

Sajuti Thalib, S.H, *Huku Kewarisan Islam Di Indonesa* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) Cet 6

Sayyid Sabiq, 2011, *Fikih Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, Cet Ke-3 Jilid 5

Sheikh Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al Quran*, cetakan ke-12, Kuala Lumpur, Darulfikir, 2002, Surah Al-Baqarah, ayat 237, juzu' kedua

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Tueku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984

Ust. Rosli Mokhtar, *Maqasid Al-Syariah (Hikmah Di Sebalik Pensyariatan)*, (Selangor : Karya Bestari Sdn. Bhd, 2007) cet. 1

Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi* (Pustaka Imam Syafi'i : 2011) Cet Pertama.

Mukhlis B. Mukti, *Syarah Bulughul Maram*,(Penerjemah), (Jakarta : Pustakan Azzam, 2006) Jilid 3

_____, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Drs. Muhammad Thalib, (Al Ma'arif, Bandung), cetakan. XX.